

PERJALANAN *SATU DEKADE* KSS INDONESIA:  
**KONTRIBUSI BAGI TERCAPAINYA  
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**







PERJALANAN SATU DEKADE KSS INDONESIA:  
**KONTRIBUSI BAGI TERCAPAINYA  
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**



**PERJALANAN SATU DEKADE KSS INDONESIA:  
KONTRIBUSI BAGI TERCAPAINYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Ed 1 - Cet 1 - Jakarta - UI Publishing, 2023

54 hlm. + vi 21 X 29,7 cm

ISBN : 978-623-333-518-8

e-ISBN : 978-623-333-519-5

Hak Cipta 2022 pada Pemerintah Republik Indonesia  
Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

**Pengarah dan Penanggung Jawab**

Dr. Yayan G. H. Mulyana | Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri

**Penyunting**

Rio Budi Rahmanto Ph.D. | Kepala Pusat Strategi Kebijakan Multilateral, BSKLN

**Penyusun**

***Tim Universitas Indonesia***

Asra Virgianita, Ph.D. | Universitas Indonesia

Agung Nurwijoyo, M.Sc. | Universitas Indonesia

Kirana Virajati, S.Hub.Int. | Universitas Indonesia

Fraka Dawa Putra Agswenko | Universitas Indonesia

Siti Zahra Aqilahanif | Universitas Indonesia

***Tim Pusat Strategi Kebijakan Multilateral***

Leonard Felix Hutabarat | Pusat Strategi Kebijakan Multilateral

Lucky Nugraha | Pusat Strategi Kebijakan Multilateral

Andri Haekal Karnadibrata | Pusat Strategi Kebijakan Multilateral

Gede Resnadiasa | Pusat Strategi Kebijakan Multilateral

Naldo Helmys | Pusat Strategi Kebijakan Multilateral

**Publikasi didukung oleh**

Universitas Indonesia Publishing

Jl Salemba Raya No 4, Jakarta Pusat 10430

Komplek ILRC Gedung B Lt 1&2

Perpustakaan Lama Universitas Indonesia

Kampus UI Depok, Jawa Barat - 16424

**Layout Isi dan Desain Cover**

Jason Kusuma

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa ijin tertulis dari penulis dan penerbit.

Mei 2023

Diterbitkan pertama kali oleh UI Publishing

Anggota IKAPI & APPTI, Jakarta

Website: [www.uipublishing.ui.ac.id](http://www.uipublishing.ui.ac.id)

email: [uipublishing@ui.ac.id](mailto:uipublishing@ui.ac.id)



# KATA PENGANTAR KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN LUAR NEGERI

Buku ini merangkum berbagai capaian Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) Indonesia selama satu dekade sejak Tim Koordinasi Nasional KSS (Tim Kornas KSS) resmi dibentuk melalui Kepmen PPN/Kepala Bappenas No. 67 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Pengembangan Kerja Sama Selatan-Selatan pada tahun 2011 hingga tahun 2021. Usia sepuluh tahun memang relatif muda, tetapi sudah dapat menjadi momentum untuk membaca tolak ukur dari apa yang sudah dicapai. Tentunya, banyak aspek yang dapat ditelaah, sebagai catatan keberhasilan maupun catatan pembelajaran untuk masa depan yang lebih baik.

Untuk itu buku **"Perjalanan Satu Dekade KSS Indonesia: Kontribusi bagi Tercapainya Pembangunan Berkelanjutan"** hadir di hadapan kita semua, sebagai buah pikiran dari kemitraan yang telah dijalin Pusat Strategi Kebijakan Multilateral (PSKM) - Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) dengan Center for International Relations Studies, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (CIReS LPPSP) - FISIP Universitas Indonesia.

KSS bukanlah konsep yang baru bagi Indonesia. Akar sejarahnya dapat ditarik sejak Konferensi Asia Afrika (KAA) diselenggarakan tahun 1955, terutama dari semangat dekolonisasi pada masa itu. KSS lantas hadir sebagai pengejawantahan solidaritas negara-negara berkembang melalui perwujudan kerja sama ekonomi dan teknik. KSS hadir sebagai alternatif kerja sama pembangunan internasional yang semula didominasi oleh negara-negara Utara. Dengan berbagai proyek yang berbasiskan pada kegiatan berbagi pengalaman, seperti pertukaran keahlian teknologi, konsep KSS kemudian diadopsi oleh PBB pada tahun 1978 melalui *Buenos Aires Plan of Action (BAPA) on Technical Cooperation among Developing Countries*.

Program KSS Indonesia telah diimplementasikan secara rutin sejak tahun 1980-an. Namun demikian, perkembangan KSS Indonesia selama satu dekade terakhir cukup signifikan dari jumlah dan jenis program yang dilaksanakan. Meskipun KSS telah hadir selama beberapa dekade, tetap perlu upaya serius untuk membuat skema kerja sama ini agar semakin dikenal secara luas oleh masyarakat. Buku ini hadir sebagai penambah khazanah berpikir kita semua. Selain memberikan gambaran apa itu KSS, buku ini utamanya menyigi bagaimana KSS telah berkontribusi pada upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030.

Pencapaian KSS Indonesia dalam buku ini dijabarkan sesuai dengan 5 (lima) pilar TPB yaitu *people, planet, prosperity, peace and partnership*. Di sini kita dapat melihat



bagaimana KSS turut berkontribusi dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan kelaparan, serta menciptakan kesejahteraan melalui berbagai usaha ekonomi, sosial, dan teknologi. Kerja sama ini juga ditujukan untuk melindungi bumi dari degradasi sembari menciptakan perdamaian, keadilan, dan masyarakat inklusif. Serta yang tidak kalah pentingnya, KSS mencerminkan semangat kemitraan dalam mengimplementasikan TPB.

Dari pencapaian itu kita dapat melihat KSS semakin penting dan strategis. KSS telah menjadi prioritas pembangunan sesuai dengan UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sedangkan dalam kebijakan luar negeri Indonesia, KSS menempati posisi yang sangat penting untuk mencapai dua hal: kepentingan nasional dan kemaslahatan dunia internasional.

KSS dapat meningkatkan jenama (*branding*) Indonesia di mata internasional sehingga soft power kita akan menjadi lebih kokoh di satu sisi, sementara di lain hal, semakin kuat implementasi program-program KSS, baik secara kuantitas maupun kualitas, diharapkan akan semakin dekat kita dengan pencapaian TPB 2030.

Indonesia juga telah meningkatkan perannya dalam KSS sebagai *new emerging donors* yang dapat melaksanakan peran ganda, sebagai penerima dan sekaligus sebagai pemberi bantuan. KSS Indonesia di masa depan sejatinya mencerminkan 'diplomasi tangan di atas'.

Saya berharap buku ini juga dapat menularkan semangat pembangunan itu sendiri. Hingga saat ini, Program KSS Indonesia mencakup bidang kesehatan, pertanian, dan program bantuan lainnya yang tersebar di berbagai kawasan seperti Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Pasifik.

Tidak kurang dari 1.000 program telah dijalankan dan diikuti sebanyak 13.000 peserta dari berbagai negara, dengan variasi kegiatan seperti pelatihan, pengiriman tenaga ahli, lokakarya, dan pemagangan. Setelah satu dekade, KSS Indonesia diyakini akan mampu secara konsisten menunjukkan peran aktifnya dalam mendorong kemajuan bersama menuju masyarakat dunia yang sejahtera, inklusif, dan berkeadilan.

Jakarta, 31 Desember 2022

**Yayan Ganda Hayat Mulyana**  
Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri  
Kementerian Luar Negeri



# KATA PENGANTAR CIReS LPPSP FISIP UNIVERSITAS INDONESIA

Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) adalah sebuah bentuk kerja sama antar negara-negara berkembang yang berbasis pada prinsip solidaritas, kesetaraan dan pembangunan kapasitas yang saling menguntungkan melalui kegiatan yang sifatnya berbagi pengetahuan, keahlian dan teknologi. Dalam perjalanannya, KSS telah menjadi bagian penting dalam kebijakan luar negeri Indonesia, sejak diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, Indonesia pada tahun 1955. Penyelenggaraan KAA merupakan perwujudan semangat solidaritas antara negara-negara berkembang yang terus dipertahankan hingga kini. Hal ini ditunjukkan dalam penyelenggaraan berbagai forum multilateral baik Konferensi Gerakan Non Blok (GNB) Pertama tahun 1961 hingga diakuinya KSS sebagai sebuah media sekaligus alat bagi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (*Sustainable Development Goals*) 2030 bagi negara-negara berkembang.

Kehadiran agenda pembangunan global yang diawali dengan *Millennium Development Goals* tahun 2000-2015, dan kemudian dilanjutkan dengan *Sustainable Development Goals* 2015-2030 menunjukkan kesadaran masyarakat dunia tentang pentingnya komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan yang merata, berkeadilan dan inklusif dengan prinsip “no one left behind.” Prinsip ini sejalan dengan semangat KSS yang pada intinya bertujuan untuk mencapai kesetaraan antar negara baik negara maju maupun berkembang, dan dengan semangat kebersamaan, saling berbagi pengalaman maupun modalitas dalam menjalankan program pembangunan. Seiring semakin meningkatnya kesadaran akan dampak pembangunan terhadap lingkungan, program-program KSS pun diarahkan pada upaya untuk memastikan proses pembangunan yang dijalankan berorientasi pada aspek keberlanjutan dan inklusivitas, yang diwujudkan dalam berbagai program antara lain terkait ekonomi biru, perubahan iklim, dan kesetaraan gender.

Dalam perjalanannya, Indonesia telah menunjukkan peran pentingnya dalam mendorong implementasi KSS dan agenda pembangunan global, tidak hanya sebagai sebuah upaya menunjukkan semangat solidaritas antar negara berkembang. Lebih jauh, hal tersebut merupakan amanah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia yang menekankan peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia, termasuk di dalamnya pembangunan dan kemakmuran bersama.

Dari sudut pandang akademik, peran dan kepemimpinan global Indonesia khususnya dalam KSS menjadi sebuah fenomena penting untuk dikaji,



terutama terkait diplomasi negara kekuatan menengah (*middle power country*) atau secara lebih luas, tentang menguatnya posisi negara-negara selatan dalam konstelasi politik global. Oleh karena itu catatan dan dokumentasi peran kepemimpinan global Indonesia menjadi satu kebutuhan tidak hanya bagi para praktisi, namun juga di dunia akademik terutama dalam upaya mengkonstruksi ragam pemikiran atas posisi dan kepemimpinan global Indonesia. Secara praktis, profil kepemimpinan global Indonesia menjadi satu kunci untuk meningkatkan daya tawar Indonesia baik dalam konteks bilateral, regional dan global.

Buku ini berisi dokumentasi satu dekade peran serta Indonesia melalui KSS dalam mencapai TPB 2030, yang disusun dengan menggunakan kerangka 5P yaitu *People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership*. Kerangka ini dipilih untuk dapat mengidentifikasi peran Indonesia dalam pencapaian TPB 2030 berdasarkan 5 pilar tersebut yang harus dipahami sebagai kerangka kerja yang saling terkait. Kerangka 5P menegaskan pentingnya keselarasan dan keseimbangan antara satu pilar dengan pilar lainnya, dengan kata lain kemajuan pada satu pilar harus menyeimbangkan dan mendukung kemajuan pada pilar yang lain.

Tim penulis menyakini buku ini menjadi satu karya yang dapat berkontribusi secara akademik dan praktis. Tidak hanya itu, diharapkan melalui buku ini dukungan masyarakat domestik dan internasional semakin menguat atas peran dan kepemimpinan global Indonesia.

Tidak lupa kami menghaturkan terima kasih kepada Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang telah mempercayakan kami untuk menyusun buku ini. Terima kasih juga kepada kementerian/lembaga terkait dan berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas kontribusinya dalam penyusunan buku ini.

Selamat Membaca!

Depok, 31 Desember 2022

**Asra Virgianita, Ph.D.**

Ketua Tim Penulis  
Centre for International Relations Studies (CIReS)  
Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN LUAR NEGERI	ii
KATA PENGANTAR CIReS LPPSP FISIP UNIVERSITAS INDONESIA	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR BAGAN	vi

<b>BAB 1</b>	<b>NAPAK TILAS KSS INDONESIA: DARI SOLIDARITAS POLITIK MENUJU KEMAKMURAN BERSAMA</b>	<b>1</b>
1.1.	KSS Indonesia dalam Sejarah	2
1.2.	Program Unggulan	5
1.3.	Agenda Pembangunan Global dan KSS Indonesia	7
<b>BAB 2</b>	<b>MANUSIA SEBAGAI AKTOR PEMBANGUNAN</b>	<b>11</b>
2.1.	Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan di Mana pun	12
2.2.	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	14
2.3.	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	15
2.4.	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	17
2.5.	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan	20
<b>BAB 3</b>	<b>KEMAKMURAN UNTUK SEMUA</b>	<b>23</b>
3.1.	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern untuk Semua	24
3.2.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	25
3.3.	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif yang Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	27
3.4.	Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarneegara	29
3.5.	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan	30

<b>BAB 4</b>	<b>KSS INDONESIA: MENJAGA BUMI KITA</b>	<b>33</b>
4.1.	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua	34
4.2.	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	35
4.3.	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	36
4.4.	Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	37
4.5.	Melindungi, Merestorasi, dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	38
<b>BAB 5</b>	<b>MENGUATKAN PERDAMAIAN, TATA KELOLA, DAN KEMITRAAN GLOBAL</b>	<b>41</b>
5.1.	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	42
5.2.	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	44
<b>BAB 6</b>	<b><i>BUILD A BETTER WORLD</i>: KOMITMEN INDONESIA UNTUK PEMBANGUNAN MASA DEPAN</b>	<b>47</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>52</b>

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Prinsip Utama KSS Indonesia	3
Gambar 2	Lini masa KSS Indonesia	5
Gambar 3	Program Unggulan dan Jenis Kegiatan KSS Indonesia	6
Gambar 4	Transformasi TPM menuju TPB	7
Gambar 5	Pilar TPB	8
Gambar 6	Pelatihan Kebencanaan kepada Pemadam Kebakaran Timor Leste	16
Gambar 7	Penandatanganan Kerja Sama Indonesia, Kepulauan Solomon, Fiji, dan Timor Leste dalam Penanganan COVID-19	16
Gambar 8	Serah Terima 200 Unit Oxygen Concentrator kepada India pada 8 Mei 2021	17
Gambar 9	Renovasi Queen Victoria School di Fiji dari Pemerintah RI pada tahun 2020	18
Gambar 10	Pemberian Hibah dari Pemerintah RI Berupa Stadion Multifungsi kepada Kepulauan Solomon pada 2019	19
Gambar 11	Peta Sebaran Peserta Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia Tahun 2011-2021	19
Gambar 12	Pelatihan Kesetaraan Gender bagi Delegasi Afghanistan (2018)	21
Gambar 13	Pelatihan Pengelolaan Perikanan bagi Negara-Negara Timur Tengah dan Afrika	27
Gambar 14	Pelatihan Inseminasi Buatan kepada Palestina	28
Gambar 15	Kegiatan <i>Sharing Best Practices on Prevention of Violence Against Women and Assistance for Women and Child Protection</i> untuk Afghanistan pada 2015	30
Gambar 16	TPB yang termasuk ke dalam pilar Planet/Bumi	34
Gambar 17	Perjanjian Hibah kepada Mozambik dan Zimbabwe untuk Mitigasi Dampak Bencana Alam Topan Idai pada 13 April 2021	36
Gambar 18	TPB ke-16 dan ke-17 dalam Menguatkan Perdamaian, Tata Kelola, dan Kemitraan Global	42
Gambar 19	Pelatihan Anti-Korupsi dari KPK kepada Delegasi Afghanistan	44
Gambar 20	Penganugerahan Indonesia atas Peran Aktifnya dalam KSS dari UNESCAP dan UNOSSC pada 2018	48

# DAFTAR BAGAN

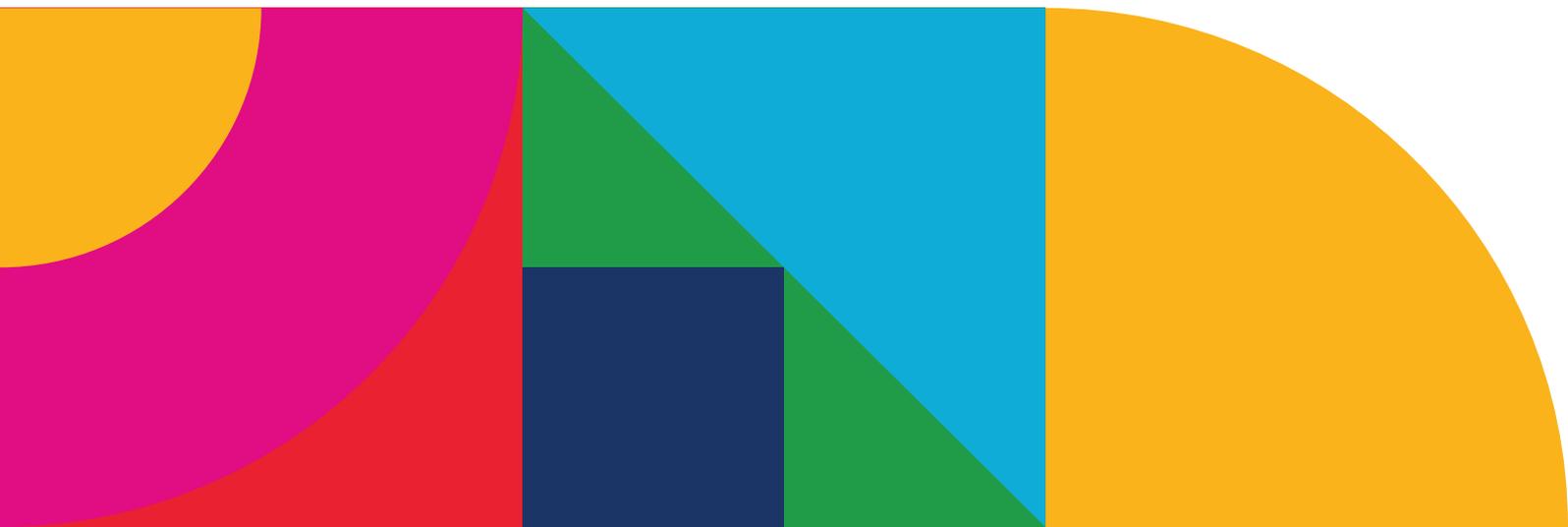
Bagan 1	Program KSS Indonesia untuk TPB ke-1 Periode 2010-2021	13
Bagan 2	Program KSS Indonesia untuk TPB ke-2 Periode 2010-2021	14
Bagan 3	Program KSS Indonesia untuk TPB ke-3 Periode 2010-2021	17
Bagan 4	Program KSS Indonesia untuk TPB ke-4 Periode 2010-2021	20
Bagan 5	Program KSS Indonesia untuk TPB ke-5 Periode 2010-2021	21
Bagan 6	Program KSS Indonesia untuk TPB ke-7 Periode 2010-2021	25
Bagan 7	Program KSS Indonesia untuk TPB ke-8 Periode 2010-2021	26
Bagan 8	Program KSS Indonesia untuk TPB ke-9 Periode 2010-2021	28
Bagan 9	Program KSS Indonesia untuk TPB ke-10 Periode 2010-2021	29
Bagan 10	Program KSS Indonesia untuk TPB ke-11 Periode 2010-2021	31
Bagan 11	Program KSS Indonesia untuk TPB ke-6 Periode 2010-2021	35
Bagan 12	Program KSS Indonesia untuk TPB ke-12 Periode 2010-2021	36
Bagan 13	Program KSS Indonesia untuk TPB ke-13 Periode 2010-2021	37
Bagan 14	Program KSS Indonesia untuk TPB ke-14 Periode 2010-2021	38
Bagan 15	Program KSS Indonesia untuk TPB ke-15 Periode 2010-2021	39
Bagan 16	Program KSS Indonesia untuk TPB ke-16 Periode 2010-2021	43
Bagan 17	Program KSS Indonesia untuk Tujuan ke-17 TPB Periode 2010-2021	45
Bagan 18	Tren Program KSS Indonesia tahun 2017 - 2020	49



## BAB 1

# Napak Tilas KSS Indonesia: Dari Solidaritas Politik Menuju Kemakmuran Bersama

Kerja Sama Selatan-Selatan adalah sarana konkret untuk mewujudkan solidaritas dan penguatan aksi bersama (*collective action*) di antara negara berkembang dengan dilandasi oleh prinsip kebersamaan, kesetaraan dan keadilan, yang lahir dari peristiwa KAA 1955 dan terus berkembang sampai saat ini. Kerja Sama Selatan-Selatan memiliki tujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi global yang setara dan berkeadilan, yang mana sejalan dengan agenda pembangunan global (*Millenium Development Goals* (MDGs) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs)). Tercatat sekitar 1.000 program yang sudah dijalankan dengan 13.000 peserta dari berbagai negara sudah mengikuti program KSS. Program tersebut antara lain berbentuk pengiriman tenaga ahli, pelatihan, lokakarya, dan pemagangan, dalam berbagai sektor (pertanian, kelautan dan perikanan, energi, demokrasi dan *good governance*, UMKM, kewirausahaan, infrastruktur, manajemen risiko bencana, dan pemberdayaan perempuan).



## KSS INDONESIA DALAM SEJARAH

Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955 dipandang sebagai titik awal munculnya kesadaran kolektif akan solidaritas antar bangsa yang menjadi cikal bakal lahirnya Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS).<sup>1</sup> Dasasila Bandung yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut, menjadi dasar perkembangan KSS sebagai perwujudan semangat solidaritas untuk ‘*Memajukan kepentingan bersama dan kerja sama*’ yang tertera dalam poin ke-9. Komitmen tersebut diejawantahkan secara konkret dengan beragam inisiasi kerja sama antar negara,

dan *Bogota Statement Towards Effective and Inclusive Development Partnership* (2010) menjadi wujud lain dari semangat KSS yang terus berjalan. Berdasarkan rantai peristiwa tersebut, dalam perjalanannya, KSS tumbuh sebagai sarana konkret dalam mewujudkan solidaritas dan penguatan aksi bersama (*collective action*) di antara negara berkembang dengan dilandasi oleh prinsip kebersamaan, kesetaraan dan keadilan.

Sejak awal berkembangnya KSS yang diilhami dari peristiwa KAA 1955, Indonesia senantiasa menjadi salah satu negara yang terus aktif berperan dalam KSS. Pada tahun 1981, Indonesia membentuk *Indonesia Technical Cooperation Program* (ITCP) sebagai wadah



... diawali, diselenggarakan, dan dikelola oleh negara berkembang sendiri biasanya dilakukan oleh Pemerintah dengan keikutsertaan aktif lembaga sektor publik dan swasta, organisasi non-pemerintah, dan perorangan. Kerja sama dilakukan dalam bentuk-bentuk yang berbeda dan terus berkembang, yaitu misalnya berbagi pengetahuan dan pengalaman, pelatihan, alih teknologi, kerja sama keuangan dan moneter serta kontribusi bukan uang (*in-kind*). Kerja Sama Selatan-Selatan dapat mencakup sektor yang berbeda-beda, dan bersifat bilateral, multilateral, sub-regional atau antar-regional. **(Definisi Kerja Sama Selatan-Selatan, PBB)**

... Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. **(Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia, 1945)**

khususnya dalam bentuk kerja sama teknik yang menjadi bentuk utama dari program KSS.

Program KSS terus berkembang seiring semakin menguatnya posisi negara-negara selatan dalam percaturan politik dan pembangunan global ditunjukkan dengan dibentuknya Gerakan Non-Blok (1961), G77 (1964), Kelompok 15 (1989), *Buenos Aires Plan of Action* (BAPA),<sup>2</sup> *Accra Agenda for Action* (AAA), *High Level Meeting on Aid Effectiveness* di Busan, Korea Selatan, hingga *South Summit* di Kuba (2000). Selain itu, inisiasi Resolusi PBB No.58/220 tentang Pembentukan *High Level Committee on South-South Cooperation*

program kerja sama teknik antar negara berkembang. Kerja sama ini bertujuan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam hal pembangunan melalui berbagai kegiatan pelatihan dan pertukaran ahli. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam KSS yang menekankan pada pengembangan kapasitas dan *southern knowledge*.

Dalam perkembangannya, Indonesia melaksanakan KSS sesuai dengan UU No.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Selain itu, keberadaan *Jakarta Commitment on Aid Development Effectiveness* pada 2009 memperkuat peningkatan kualitas tata kelola bantuan internasional.<sup>3</sup>



*Gambar 1. Prinsip Utama KSS Indonesia*

Hal ini makin diperkokoh dengan pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Selatan-Selatan Indonesia pada tahun 2010 yang beranggotakan empat Kementerian/Lembaga Negara meliputi: Kementerian Luar Negeri (bidang kebijakan luar negeri dan diplomasi), Kementerian PPN/BAPPENAS (bidang kebijakan nasional, kerja sama pembangunan, dan penganggaran), Kementerian Sekretariat Negara (dukungan dan fasilitas), dan Kementerian Keuangan. Dengan dibentuknya Tim Kornas KSS Indonesia, berbagai pembenahan secara kelembagaan terus dilakukan Pemerintah Indonesia, sehingga tahun 2017 Kementerian Luar Negeri ditetapkan sebagai jangkar utama Tim Kornas.

Langkah besar juga dilakukan oleh Indonesia dengan pembentukan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) tahun 2019. Lembaga ini berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 927/KMK.05/2019 yang dirancang sebagai badan yang mengurus program kerja sama pembangunan Indonesia, termasuk di dalamnya program KSS. Lembaga ini diresmikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 18 Oktober 2019 sebagai wujud ‘diplomasi tangan di atas’.



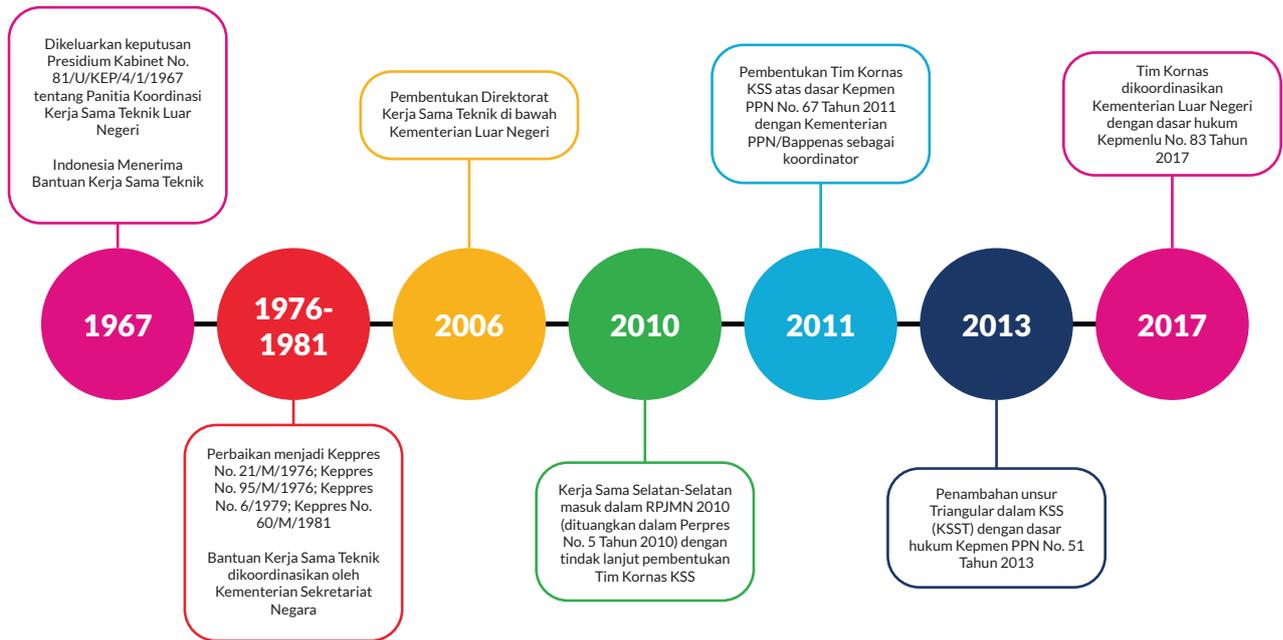
**LDKPI akan  
memperkokoh peran  
Indonesia dalam  
melaksanakan  
ketertiban dunia  
melalui penguatan  
Kerja Sama  
Pembangunan  
Internasional.**

---

**Menteri Luar Negeri RI  
Retno Marsudi**



# Lini Masa KSS Indonesia



Gambar 2. Lini Masa KSS Indonesia

## PROGRAM UNGGULAN

Hingga hari ini, Indonesia telah tercatat memberikan beragam program KSS, baik itu di bidang kesehatan, pertanian, dan program bantuan lain yang tersebar di berbagai kawasan seperti Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Pasifik. Tercatat kurang lebih 1.000 program telah dijalankan dan diikuti sebanyak 13.000 peserta dari berbagai negara, dengan variasi kegiatan seperti pelatihan, pengiriman tenaga ahli, lokakarya, dan pemagangan.

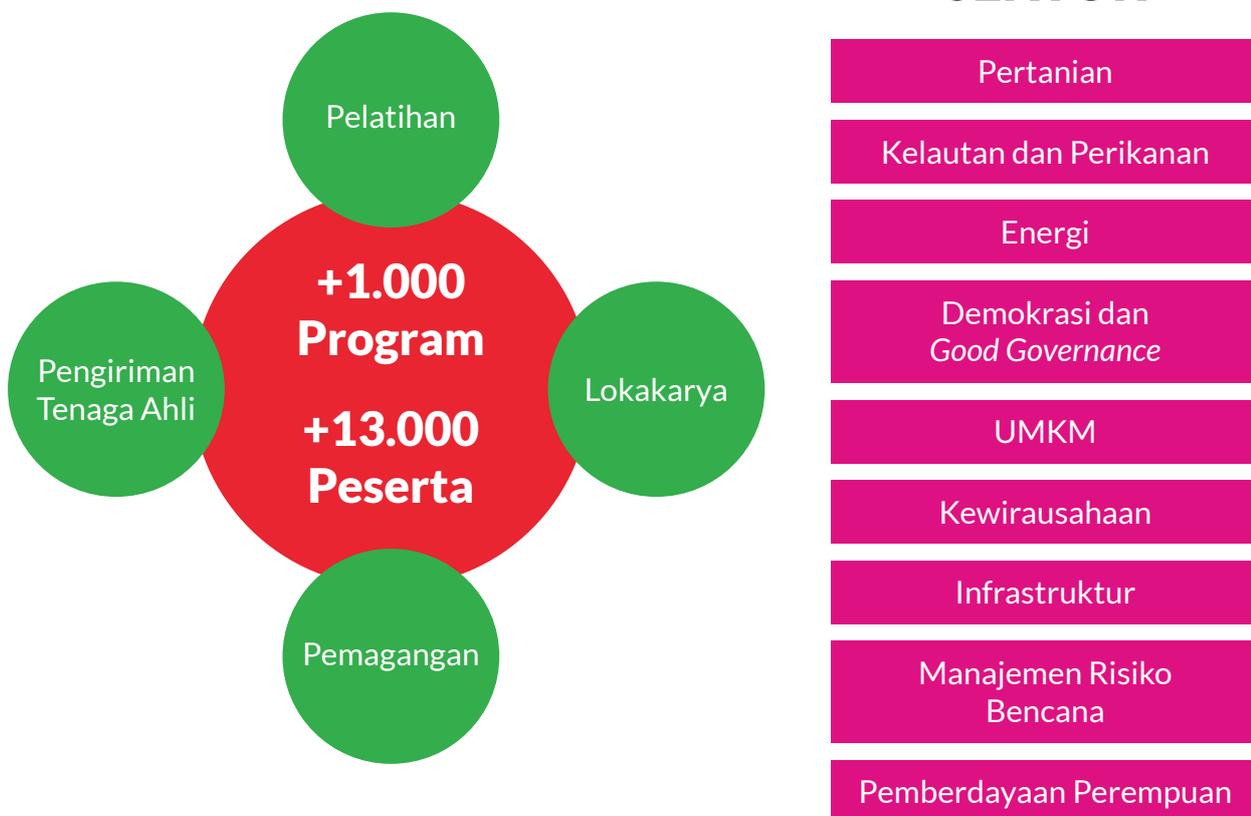
Dalam perjalanannya, KSS Indonesia telah memiliki program unggulan (*flagship program*). Terdapat tiga program unggulan KSS Indonesia, yaitu 1) isu pembangunan, 2) isu ekonomi, dan 3) isu tata kelola pemerintahan. Hal ini didasari besarnya permintaan dari negara penerima manfaat (*beneficiary*) terhadap tiga program unggulan tersebut sesuai dengan masalah utama di negara berkembang. Selain itu, program unggulan juga memperhitungkan modalitas yang dimiliki Indonesia.

Seiring dengan kehadiran agenda pembangunan global, program KSS pun ditetapkan sebagai salah satu instrumen pencapaian agenda tersebut. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030, yang menekankan pentingnya kontribusi multipihak untuk mewujudkan dunia yang lebih ramah lingkungan, inklusif secara sosial, dan berdampak bagi ekonomi masyarakat luas menjadi payung berbagai skema kerja sama pembangunan, termasuk KSS. Kondisi ini sejalan dengan tujuan KSS yaitu perwujudan pembangunan ekonomi global yang setara dan berkeadilan.

## Box 1. Program Unggulan KSS Indonesia



Box 1. Daftar Flagship Program KSS Indonesia



Gambar 3. Program Unggulan dan Jenis Kegiatan KSS Indonesia

# AGENDA PEMBANGUNAN GLOBAL DAN KSS INDONESIA

Ide pembangunan berkelanjutan telah bertransformasi menjadi suatu semangat kolektif antar negara dalam menciptakan dunia yang lebih baik. Ide tersebut berawal dari laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) “Our Common Future” melalui studi Komisi Brundtland tahun 1987 yang mengkaji isu lingkungan sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan.

Kemudian terus terakumulasi membentuk *Millenium Development Goals* (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Milenium (TPM) tahun 2001 sebagai kelanjutan dari *UN Millennium Summit* tahun 2000 dengan adanya *UN Millenium Declaration*.

Setelah 15 tahun berselang, PBB mendorong adanya pembaharuan terhadap komitmen pembangunan berkelanjutan dengan disepakatinya *Agenda 2030 for Sustainable Development* sebagai hasil dari *UN Sustainable Development Summit 2015*. Sebanyak 17 target dicanangkan untuk mengakhiri kemiskinan, ketidakadilan, dan ketidaksetaraan, dan isu kerusakan lingkungan dan perubahan iklim pada tahun 2030.

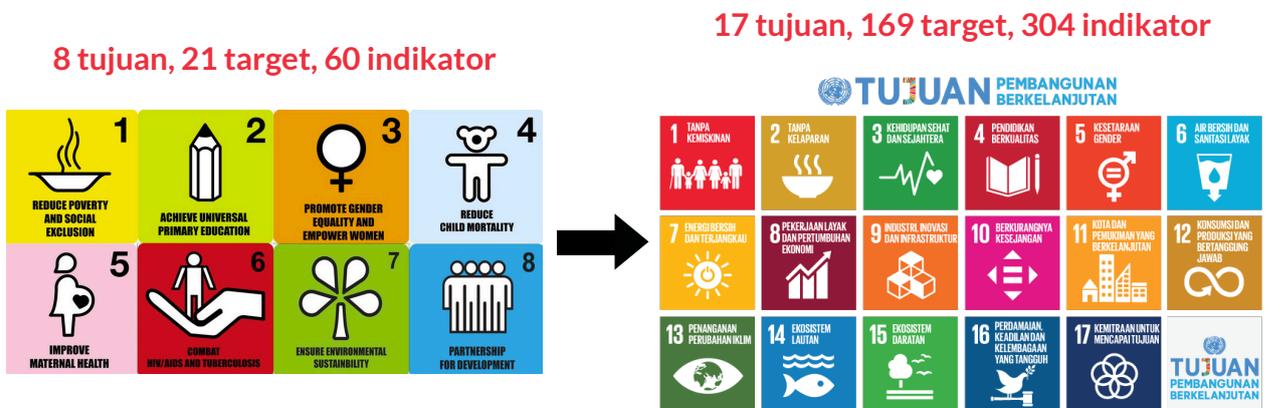
Hal yang membedakan dalam perkembangan TPM dan TPB terletak pada pembentukan TPB yang dirancang lebih partisipatif. Keterlibatan aktor-aktor pembangunan baik pemerintah, lembaga



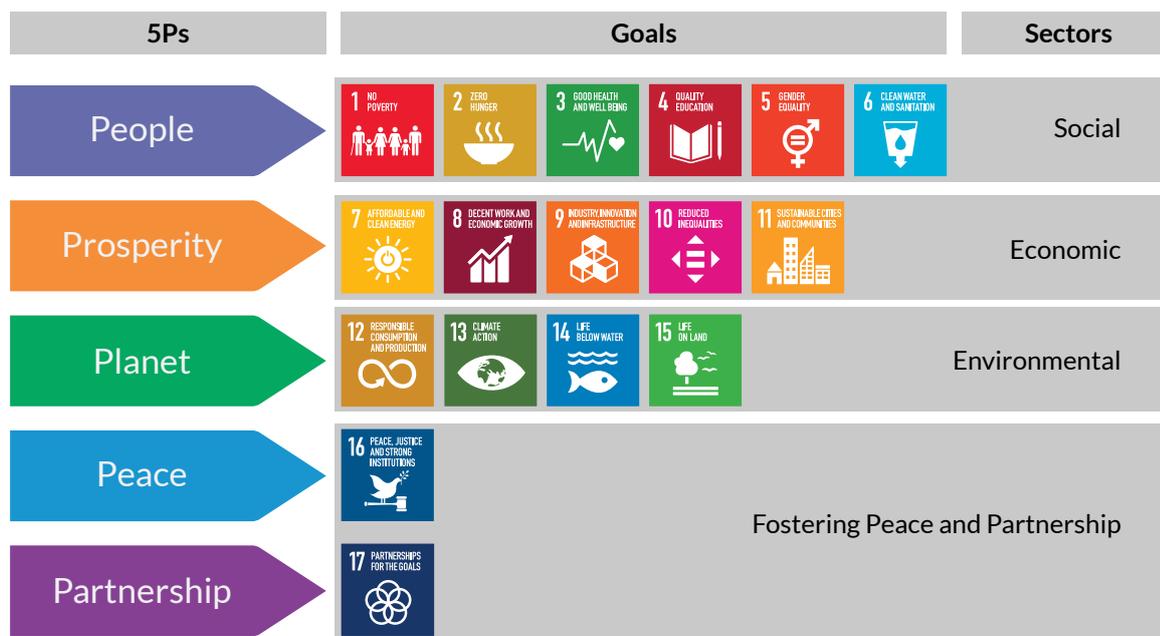
Pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan untuk generasi di masa mendatang dengan menitikberatkan pada daya dukung lingkungan, pencapaian keadilan sosial, berkelanjutan ekonomi dan lingkungan. *(Definisi Agenda Pembangunan Global, Brundtland Report)*

swadaya masyarakat, swasta, akademisi, dan mitra pembangunan menjadi pembeda penting antara TPM dan TPB. Perkembangan TPB ditopang dengan prinsip utamanya yaitu ‘tidak meninggalkan satu orang pun’ (*leave no one behind*) (LDKPI, n.d.).

TPB dibangun di atas 5 pilar yaitu *People, Planet, Prosperity, Peace and Partnership*, dengan 17 tujuan yang tersebar dalam pilar-pilar tersebut yang memiliki keterkaitan satu sama lain, dengan berfokus pada empat sektor yaitu sosial, ekonomi, lingkungan hidup,



Gambar 4. Transformasi TPM menuju TPB



Gambar 5. Pilar TPB

serta mendorong perdamaian dan kemitraan.<sup>4</sup> Kelima pilar yang dimaksud yaitu:

- **People** mencakup usaha yang dilakukan oleh negara-negara dalam mengentaskan kemiskinan dan kelaparan, TPB 1, 2, 3, 4 dan 5 menjadi bagian dari pilar ini.
- **Planet** mencakup berbagai usaha yang dilakukan untuk melindungi bumi dari degradasi, terkait erat dengan berbagai indikator yang termuat dalam TPB 6, 12, 13, 14 dan 15.
- **Prosperity** mencakup berbagai upaya dalam menciptakan kesejahteraan yang terkait dengan usaha ekonomi, sosial dan teknologi. TPB yang masuk dalam pilar ini adalah 7, 8, 9, 10, dan 11.
- **Peace** (perdamaian) menitikberatkan pada upaya penciptaan perdamaian, keadilan dan masyarakat yang inklusif yang terbebas dari ketakutan dan kekerasan, termaktub dalam TPB 16.
- **Partnership** mencakup usaha dalam mengimplementasikan agenda pembangunan global melalui berbagai upaya yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, merupakan bagian dari TPB 17. Sejalan dengan prinsip dan tujuan KSS, penting untuk memetakan kontribusi program KSS Indonesia dalam

kerangka TPB. Pemetaan ini setidaknya akan menunjukkan peran aktif Indonesia dalam mendukung tercapainya TPB terutama di negara-negara berkembang, dan sekaligus juga sebagai evaluasi atas pelaksanaan KSS Indonesia selama ini.

Semangat solidaritas dan tanggung jawab sebagai warga dunia, serta sebagai perwujudan amanah konstitusi RI, KSS Indonesia diyakini akan mampu secara konsisten menunjukkan peran aktifnya dalam mendorong kemajuan bersama menuju masyarakat dunia yang sejahtera, inklusif, dan berkeadilan.



## CATATAN AKHIR

1. Sejumlah literatur yang menegaskan KAA sebagai cikal bakal KSS antara lain Chris Alden, Sally Morphet, dan Marco Antonio Vieira, *The South in World Politics*, (New York: Palgrave Macmillan, 2010), Kevin Gray dan Barry Gills, 'South-South Cooperation and the Rise of the Global South,' *Third World Quarterly* Vol. 34, No. 4 (2016), 557; Sandra H. Bry, "The Evolution of South-South Development Cooperation: Guiding Principles and Approaches," *European Journal of Development Research* (2016)
2. Keberadaan BAPA penting dalam sejarah KSS karena BAPA merupakan tonggak sejarah Kerja Sama Teknik Negara Berkembang. Secara formal, melalui forum Majelis Umum PBB, KTNB resmi disahkan menjadi satu resolusi dengan prinsip kerjasama yang bertujuan untuk mempercepat kemandirian pembangunan di negara berkembang.
3. Penyertaan mitra pembangunan menjadi spirit penting dari Jakarta Commitment yang lazim disebut dengan Kerja Sama Triangular yakni kerja sama antara 3 pihak: Indonesia, Lembaga Mitra Pembangunan, dan Negara Penerima Manfaat.
4. Selain klasifikasi berdasarkan PBB, BAPPENAS RI juga membuat pengelompokan SDGs berdasarkan empat pilar yang meliputi: (1) Pilar Pembangunan Sosial, tujuan 1,2,3,4 dan 5; (2) Pilar Pembangunan Ekonomi, tujuan 7,8,9,10 dan 17; (3) Pilar Pembangunan Lingkungan, tujuan 6,11,12,13,14, dan 15; dan (4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, tujuan 16.



## BAB 2

# Manusia sebagai Aktor Pembangunan

Dari tahun 2010 hingga 2021, telah dilaksanakan

19

Program Kerja Sama  
Selatan-Selatan untuk  
TPB 1

161

Program Kerja Sama  
Selatan-Selatan untuk  
TPB 4

76

Program Kerja Sama  
Selatan-Selatan untuk  
TPB 2

17

Program Kerja Sama  
Selatan-Selatan untuk  
TPB 5

51

Program Kerja Sama  
Selatan-Selatan untuk  
TPB 3

Ekonomi dan manusia adalah dua kata kunci yang selalu hangat untuk dibahas berkaitan dengan pembangunan. Menurut Amartya Sen, pembangunan adalah suatu proses untuk memperluas cakupan kebebasan yang dapat diakses oleh masyarakat (Sen, 2001). Lebih lanjut, terdapat lima kebebasan yang menurut Amartya Sen dapat meningkatkan kemampuan dasar seseorang, yaitu: 1) kebebasan politik; 2) fasilitas ekonomi; 3) kesempatan sosial; 4) jaminan transparansi; dan 5) perlindungan keamanan.

Kebebasan fasilitas ekonomi dan kesempatan sosial adalah dua kebebasan yang berkaitan erat dengan fokus TPB pada bagian ini. Perlu dicatat, bahwa manusia berperan sebagai aktor yang merumuskan dan menjalankan program-program pembangunan, sekaligus menjadi penerima manfaat dari pembangunan (*People Centered Development*). Oleh karenanya, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan harus memberikan keuntungan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali (UN, UN Documentation: Development, n.d.).

Namun, berdasarkan sebuah survei yang dilakukan oleh Gallup, salah satu badan riset dari Amerika Serikat, terdapat 750 juta jiwa yang saat ini hidup dalam keadaan 'sangat rentan' atau kesulitan untuk mendapatkan tempat tinggal dan/atau makanan dan tidak memiliki sanak saudara yang dapat membantu mereka ketika mereka bermasalah (Esipova, Ray, & Han, 2020). Gallup juga menyertakan sembilan negara yang persentase masyarakatnya dalam keadaan 'sangat rentan' tinggi, yaitu Afghanistan, Benin, Malawi, Togo, Sierra Leone, Zambia, Republik Kongo, Maroko, dan India (Esipova, Ray, & Han, 2020) yang merupakan negara-negara Selatan. Kondisi ini menjadi tantangan dalam perwujudan TPB.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki perhatian besar atas upaya untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat dunia, khususnya negara-negara Selatan. Semangat solidaritas dan besarnya rasa tanggung jawab untuk berkontribusi dalam pencapaian agenda pembangunan global mendorong Pemerintah RI memainkan peran aktif dalam mendukung pilar masyarakat dalam pencapaian TPB yang menempatkan manusia sebagai fokus utama seperti pengentasan kemiskinan dan kelaparan, jaminan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, dan kesetaraan gender.

## **MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN DI MANA PUN**

Kemiskinan adalah suatu kondisi yang tidak hanya menunjukkan kekurangan seseorang terkait pendapatan, tetapi juga menunjukkan kesulitan seseorang untuk mengakses kehidupan yang berkelanjutan; tidak hanya sebatas untuk menyambung hidup ke hari-hari berikutnya. Ketika berada di dalam kemiskinan, seseorang akan memiliki akses yang terbatas kepada asupan makanan yang sehat dan bernutrisi, pendidikan yang layak, kebutuhan-kebutuhan umum lainnya seperti air dan listrik. Selain itu, orang-orang yang berada di dalam keadaan ini juga rentan untuk mengalami diskriminasi secara sosial yang akan merugikan mereka.

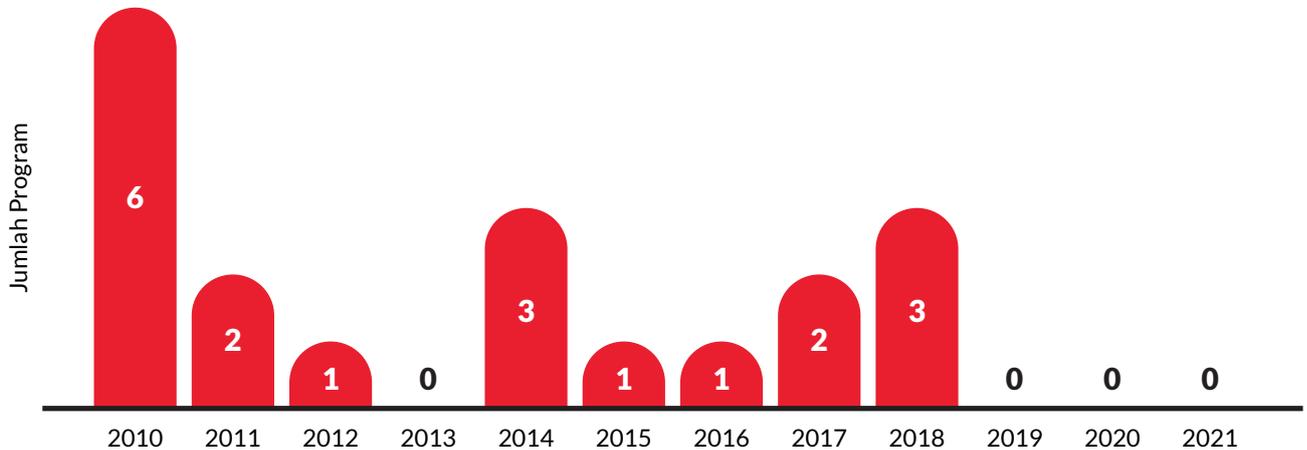
Hingga tahun 2015, tercatat 736 juta jiwa atau 10% dari populasi global hidup dengan biaya di bawah ambang kemiskinan internasional, yaitu hidup dengan biaya kurang dari USD 1,90 setiap harinya (World Bank Group, n.d.). Persentase 10% itu telah berkurang jika dibandingkan kondisi pada tahun 1990 (36%) dan 2010 (16%). Namun, tren penurunan angka kemiskinan terlihat melambat. Bahkan apabila garis kemiskinan yang dipakai ialah di bawah USD 2,15 per orang per hari, sesuai dengan penyesuaian yang dilakukan pada tahun 2017, maka angka kemiskinan dapat dikatakan terus naik. Persentasenya pada tahun 2020 mencapai 9,3% atau naik dari 8,4% pada tahun 2019. Diperkirakan, masih ada 574 juta jiwa atau 7% populasi global yang hidup di bawah USD 2,15 per hari pada tahun 2030 (The World Bank, 2022). Sehingga, TPB untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem menjelang 2030 tampak sulit dicapai. Terlebih apabila tidak ada peningkatan signifikan pada faktor-faktor yang turut memperlambat penurunan kemiskinan, seperti kurangnya peningkatan kesehatan masyarakat di tingkat global, disparitas gender yang terus berlanjut, serta situasi pendidikan yang mengalami krisis sebagai dampak pandemi COVID-19 (United Nations, 2022). Dengan begitu, upaya pengurangan kemiskinan masih perlu terus dilakukan termasuk dengan cara meningkatkan akses terhadap air bersih dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Kemiskinan masih menjadi tujuan pertama di dalam TPB dalam tajuk 'Mengakhiri segala bentuk

kemiskinan di mana pun (*No Poverty*). Dua wilayah yang masyarakatnya paling banyak hidup di dalam kemiskinan adalah bagian selatan dari Asia dan Sub-Sahara Afrika. Kedua wilayah ini merupakan cakupan

*the Improvement of Basic Service Provision*” dan mengikutsertakan kembali JICA sebagai mitra dalam program ini, dengan Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) sebagai lembaga pelaksana.

## Program KSS yang Dikategorikan sebagai Tujuan 1 TPB



**Bagan 1.** Program KSS Indonesia untuk TPB ke-1 Periode 2010-2021  
 Sumber: Olahan Penulis dari Data Laporan Tahun KSS Indonesia tahun 2010-2021/berbagai sumber

dari KSS, sehingga mekanisme KSS dapat mengambil bagian untuk mencapai tujuan Tanpa Kemiskinan.

Indonesia, melalui mekanisme KSS, telah banyak terlibat membantu berbagai kegiatan penanggulangan kemiskinan meliputi peningkatan kapasitas yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam aksi pengentasan kemiskinan. Sejak 2010 hingga 2021, terdapat beberapa program yang berhubungan langsung dengan tujuan pertama TPB. Misalnya, *“Building for Poverty Reduction”* dan *“Third Country Training Program on Capacity Building”* yang dilaksanakan pada tahun 2011.

Program selanjutnya digagas pertama kali oleh Kementerian Sekretariat Negara untuk melatih perwakilan yang berasal dari Palestina, Laos, dan Timor Leste. Dalam kegiatan dengan Palestina, *Japan International Cooperation Agency (JICA)* terlibat sebagai mitra dalam mekanisme triangular KSS.

Program lain yang secara langsung ditujukan untuk pengentasan kemiskinan terjadi pada tahun 2017, di bawah program *“Sustainable Energy and Poverty Reduction: Community Participatory Development of Sustainable Energy and Poverty Reduction for*

Kemudian, terdapat program *Third Country Training Program (TCTP)* sebagai salah satu program kegiatan KSS yang mampu memberikan dampak baik bagi perkembangan pengentasan kemiskinan. Program ini memiliki beragam fokus yang berkaitan dengan isu-isu global, seperti pengurangan kemiskinan, pembangunan kapasitas, penyuluhan kesehatan ibu dan anak, pertanian, pelatihan tenaga didik, dan lain-lain.

Melalui program ini, pemerintah RI bersama JICA memberikan pelatihan kepada aparatur pemerintah lokal, praktisi-praktisi lembaga masyarakat, dan aktor-aktor lokal terkait lainnya. Pelatihan-pelatihan ini diharapkan dapat memberikan peserta dari pelatihan TCTP kemampuan untuk mengelola program-program penanggulangan kemiskinan di daerahnya yang melibatkan aktor-aktor lokal dan memperkuat perannya di dalam inisiasi pengentasan kemiskinan. Negara-negara Selatan yang menerima bantuan dari Indonesia dalam bentuk TCTP ini diharapkan dapat belajar dari pengalaman Indonesia sebagai negara yang mampu untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dari tahun 1998 hingga 2010 secara signifikan.

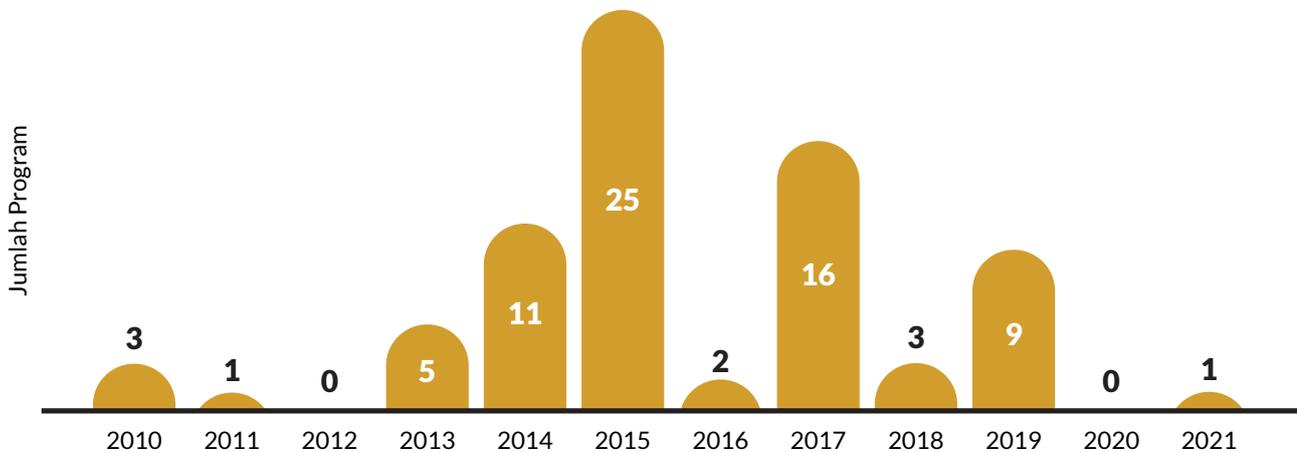
## MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN YANG BERKELANJUTAN

Pada tahun 2020, terdapat sekitar 720 hingga 811 juta jiwa yang terjebak di dalam kondisi kelaparan meskipun planet ini dapat memproduksi makanan untuk seluruh populasinya, bahkan lebih (Action Against Hunger, 2022). Lebih mirisnya lagi, produsen pangan seperti petani kecil dan nelayan juga mengalami kelaparan dan rentan terhadap kerawanan pangan, padahal mereka sudah menyumbangkan sekitar 70% kepada pasok pangan global (Action Against Hunger, 2022).

disebabkan kelaparan menunjukkan bahwa seseorang tidak memiliki akses atau memiliki akses yang terbatas terhadap makanan. Minimnya akses terhadap pangan ini erat dikaitkan dengan kondisi ekonomi atau situasi krisis seperti konflik. Tercatat 1 dari 10 orang di dunia mengalami kelaparan, sementara 1 dari 3 orang di dunia tidak memiliki akses atas makanan yang memadai.

Kelaparan memiliki keterkaitan dengan beberapa aspek terkait pangan, seperti kerawanan pangan, malnutrisi, dan pertumbuhan stunting atau gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan oleh gizi buruk. Maka dari itu, Tanpa Kelaparan menjadi salah satu tujuan yang perlu dicapai melalui TPB. TPB ke-2 mencakup penuntasan terhadap kelaparan dan malnutrisi, perbaikan sistem produksi pangan yang meliputi perbaikan agrikultur dan peningkatan hasil ternak.

### Program KSS yang Dikategorikan sebagai Tujuan 2 TPB



Bagan 2. Program KSS Indonesia untuk TPB ke-2 Periode 2010-2021  
Sumber: Olahan Penulis dari Data Laporan Tahun KSS Indonesia tahun 2010-2021/berbagai sumber

Upaya untuk mengurangi kelaparan ini telah berhasil menurunkan angka kelaparan secara relevan dari 15% pada periode 2000 ke 8,9% pada tahun 2019 (United Nations, n.d.). Akan tetapi, upaya ini kemudian mengalami kemunduran dengan terjadinya pandemi COVID-19, sehingga saat ini angka kelaparan kembali mencapai 9,9% pada tahun 2020 (United Nations, n.d.). Angka kelaparan global ini cukup mengkhawatirkan

Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapai TPB ke-2 adalah memperbanyak variasi benih tumbuhan pangan, memperbaiki sistem irigasi, membangun sistem pertanian yang baik dan kuat, serta menjamin ketersediaan olahan dari hewan-hewan ternak seperti ayam, sapi, dan kambing.

Terdapat 16 kegiatan KSS Indonesia yang fokus pada inseminasi buatan dari tahun 2010 hingga 2021.

Kegiatan yang khusus melibatkan inseminasi untuk sapi perah dilakukan pada tahun 2010 dalam program *Artificial Insemination on Dairy Cattle for Developing Countries*, pada tahun 2011 dalam program *Third Country Training Program of Artificial Insemination on Dairy Cattle*, dan pada tahun 2021 dalam program *Management of Dairy and Beef Cattle Breeds for Intensive Production for Palestine*.

Terdapat juga satu program khusus yang membahas mengenai inseminasi buatan untuk ternak ikan dalam program *Sustainable Fish Farming through the Adoption of Artificial Insemination for Palestine* yang dilaksanakan pada 5–25 Februari 2019 dan melibatkan peserta dari Palestina.

Selain itu, kegiatan terkait inseminasi buatan yang khusus untuk mendorong ketahanan pangan dilakukan melalui program *International Training on Strengthening of the Artificial Insemination to Achieve Food Security in Republic of Timor Leste* yang dilaksanakan di Malang pada 26 Oktober hingga 8 November 2014. Program terkait inseminasi buatan menjadi program yang sering dilakukan oleh Indonesia dalam mendukung pencapaian TPB ke-2.

Selain itu, Indonesia juga turut membantu berbagai upaya dalam mengurangi kelaparan melalui program-program seperti pelatihan, pengiriman ahli, pemberian pengetahuan mengenai nutrisi dan cara mengontrol pangan, pengiriman benih dan inseminasi buatan.

Sejak tahun 2010 hingga 2021, Indonesia telah mengadakan lebih dari 50 kegiatan yang berkaitan dengan TPB ke-2 yang melibatkan berbagai mitra-mitra pembangunan, seperti JICA, *Non-Aligned Movement Centre for South-South Technical Cooperation (NAM-CSSTC)*, *Islamic Development Bank (IsDB)*, hingga aktor-aktor negara seperti *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* dan Pemerintah Jepang. Negara-negara Selatan yang menerima manfaat dari KSS Indonesia pun cukup beragam, dari negara-negara Asia, Pasifik Selatan, hingga negara-negara Afrika seperti Kenya, Sudan, Zimbabwe, Afrika Selatan, dan Suriname.



## **MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA**

Manusia adalah makhluk hidup yang rentan. Banyak risiko yang dapat menyerang kesejahteraan manusia, mulai dari penyakit, kecelakaan, bencana alam, dan kondisi-kondisi tak terduga lainnya. Ketika kesejahteraan manusia terganggu, maka produktivitasnya juga akan terganggu. Maka dari itu, TPB ke-3 hadir untuk mengurangi risiko-risiko yang timbul ketika kesejahteraan manusia terganggu, terutama risiko fatal yang berujung pada kematian. TPB ke-3 memiliki tajuk *Kehidupan Sehat dan Sejahtera* dan memiliki tujuan spesifik memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua usia.

Saat ini, dunia sedang mengalami beberapa permasalahan terkait kesehatan global, yaitu menurunnya angka harapan hidup global dan jangkauan imunisasi, maraknya penyakit kesehatan mental seperti depresi dan gangguan kecemasan, serta meningkatnya angka kematian karena tuberkulosis dan malaria (United Nations, n.d.).

Penyakit-penyakit menular masih menjadi salah satu ancaman yang membahayakan kesejahteraan manusia, di antaranya adalah pandemi COVID-19 yang menyebar ke seluruh belahan dunia dengan cepat dan merenggut banyak korban jiwa, termasuk tenaga-tenaga kesehatan yang sangat berisiko terpapar virus tersebut. Per 29 November 2022, tercatat 6.618.579 kematian yang diakibatkan oleh COVID-19 di seluruh dunia (World Health Organization, n.d.). Meskipun penanganan untuk mengurangi angka kematian telah dilakukan melalui pendistribusian vaksin hingga 4 dosis, virus ini nyatanya masih memakan korban hingga saat ini. COVID-19 ini menjadi salah satu contoh serangan terhadap kesejahteraan manusia yang tidak hanya menyerang satu negara, tetapi menjadi permasalahan di seluruh negara di dunia dan membutuhkan kerja sama untuk menanganinya.

Pada era pandemi COVID-19, Indonesia melaksanakan 8 program berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan secara online atau dalam jaringan (daring). Di tahun 2020, program-program yang dilaksanakan adalah *South-South and Triangular Cooperation (SSTC) Webinar on Strategic Partnership with Muslim Religious Leaders in Family Planning, Reproductive Health, and in Prevention and Response to Violence Against Women and Child Marriage*; *South-South and Triangular Cooperation Online Training on Reproductive Health, Family Planning, Adolescent Reproductive Health and Prevention of Gender-based Violence and Child Marriage for Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao Youth Muslim Leaders (BARMM)*; *International Webinar on Women's Empowerment and Child Protection Program and Its Contribution to Indonesia's International Development Cooperation Program*; Program Kerja Sama Selatan-Selatan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Palestina; *SSTC online training on Strategic Partnership with Muslim Religious Leaders in Family Planning, Reproductive Health, and in Prevention and Response to Violence Against Women and Child Marriage*; dan *Knowledge Sharing Program on Maternal and Child Health Handbook: Sharing the Experiences and Lessons Learned on MCH Handbook Implementation in the Era of COVID-19 Pandemic*. Terakhir, kegiatan yang Indonesia pada tahun 2021 adalah *Knowledge Program on Maternal and Child Health Handbook*.



Gambar 6. Pelatihan Kebencanaan kepada Pemadam Kebakaran Timor Leste

Dalam mengurangi risiko fatal yang dapat muncul dari bencana atau situasi yang tidak terduga, Indonesia melaksanakan 3 program yang hanya melibatkan peserta dari Timor Leste. Ketiga program tersebut adalah *Establishment of Timor-Leste Multi Hazard Early Warning System* pada Mei 2016 dan 2017, *International Training on Fire Fighting for Timor Leste* pada Agustus

2017, dan *Workshop on Enhancing Capacity and Awareness of Timor Leste towards Earthquake and Tsunami Hazards* pada Oktober dan November 2017. Total peserta dari Timor Leste yang mengikuti program KSS untuk mengurangi risiko fatal dari bencana ini adalah 40 peserta.



Gambar 7. Penandatanganan Kerja Sama Indonesia, Kepulauan Solomon, Fiji, dan Timor Leste dalam Penanganan COVID-19

Indonesia juga banyak berkontribusi dalam isu kesehatan terkait vaksin. Indonesia membantu melalui *The Organization of Islamic Cooperation (OIC)*. Seperti misalnya di tahun 2016, diadakan pertemuan *Vaccine Manufacturer Group* dan seminar mengenai manajemen vaksin. Dalam pertemuan kelompok produsen vaksin, pembahasan difokuskan kepada penguatan Otoritas Regulasi Nasional dan dibentuknya basis data di antara negara-negara OIC yang berkaitan dengan vaksin. Dalam rangkaian kegiatan ini, Bio Farma sebagai produsen vaksin terbesar di Indonesia berpartisipasi dan memberikan banyak gambaran mengenai produksi vaksin serta proses riset dan pengembangannya. Negara-negara OIC yang terlibat di dalam rangkaian acara ini adalah Pakistan, Turki, Tunisia, Malaysia, Iran, Arab Saudi, Maroko, Senegal, Mesir, dan Bangladesh. Organisasi-organisasi internasional juga turut berpartisipasi, seperti *World Health Organization (WHO)*, *United Nations Children's Fund (UNICEF)*, *IsDB*, *Social Research and Training Center for Islamic countries (SESRIC)*, dan *the Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI)*. Di dalam acara ini, kegiatan-kegiatan di luar diskusi seperti pelatihan dan studi lapangan ke tempat produksi vaksin juga dilakukan. Dalam kegiatan ini, Bio Farma muncul sebagai salah satu aktor non-pemerintah yang turut aktif di dalam KSS Indonesia.

Kontribusi KSS Indonesia dalam mendukung tujuan ini di masa pandemi COVID-19 terlihat dengan bantuan

yang diberikan Indonesia dalam bentuk hibah kepada Pemerintah Fiji, Kepulauan Solomon, dan Timor Leste pada Desember 2022. Indonesia mengirimkan bantuan masing-masing kepada tiga negara tersebut sejumlah IDR 2,88 miliar yang diperuntukkan bagi penyediaan alat-alat kesehatan dalam penanganan COVID-19 (LDKPI, 2016).

Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, upaya Indonesia tidak hanya diberikan kepada negara-negara kawasan Pasifik. Indonesia merespons peningkatan kasus COVID-19 di India dengan memberikan hibah kemanusiaan dalam bentuk 200 unit oxygen concentrator. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno L. P. Marsudi secara simbolik memberikan bantuan tersebut kepada Duta Besar India untuk Indonesia H.E. Manoj Khumar Bharti (Rokom, 2021).



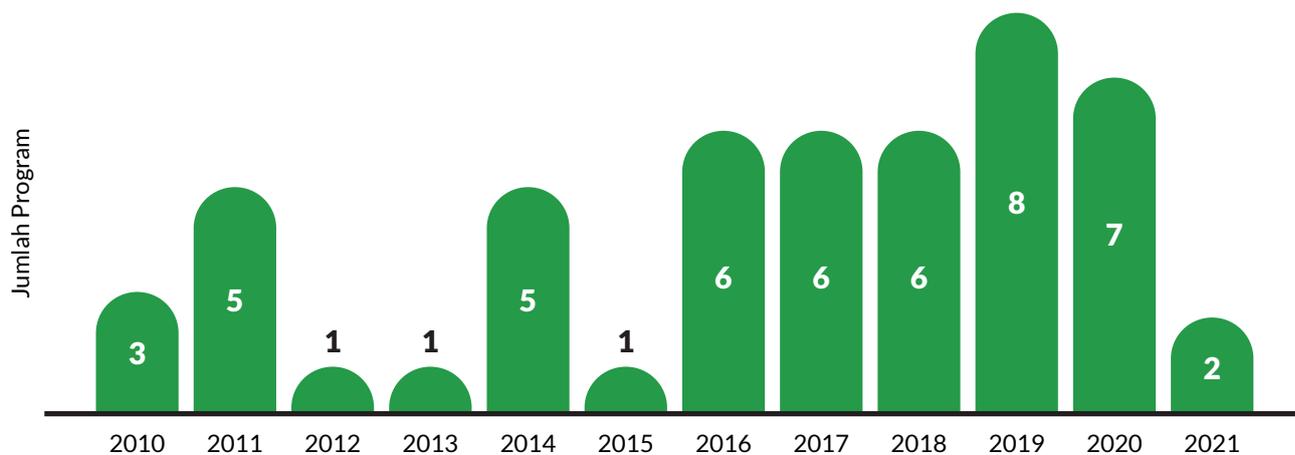
Gambar 8. Serah Terima 200 Unit Oxygen Concentrator kepada India pada 8 Mei 2021

## **MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA**

Pembangunan ekonomi dan manusia tidak akan luput membahas pendidikan sebagai salah satu sarana untuk membangun kemampuan individu. Tidak hanya untuk sebatas meningkatkan pendapatan, tetapi juga untuk membangun kemampuan-kemampuan seperti berpikir kritis, kreativitas, manajemen waktu, dan kemampuan-kemampuan lainnya yang akan bermanfaat dalam menjalani kehidupan yang berkelanjutan. Maka dari itu, pendidikan selalu menjadi salah satu tujuan di agenda-agenda pembangunan, tak terkecuali TPB.

Meskipun selalu menjadi bagian dari agenda-agenda pembangunan, dunia masih dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan terkait pendidikan. Selain itu, pendidikan sering kali masih dilihat sebagai sesuatu yang eksklusif dan mahal, sulit untuk diakses oleh orang-orang yang tidak memiliki biaya untuk pendidikan. Situasi krisis juga dapat menghalangi

### **Program KSS yang Dikategorikan sebagai Tujuan 3 TPB**



Bagan 3. Program KSS Indonesia untuk TPB ke-3 Periode 2010-2021

Sumber: Olahan Penulis dari Data Laporan Tahun KSS Indonesia tahun 2010-2021/berbagai sumber

kegiatan pendidikan untuk dilaksanakan karena minimnya fasilitas ketika terjadi krisis dan kurangnya tenaga pendidik.

Pendidikan yang dibahas di dalam TPB tidak hanya berbicara mengenai pendidikan formal yang diikuti oleh anak-anak usia dini dan sekolah, tetapi juga pendidikan-pendidikan yang menunjang bakat dan kemampuan individu untuk mendapatkan penghasilan, seperti vokasi, sekolah tinggi, dan universitas. Kemampuan membaca dan menghitung juga menjadi salah satu fokus dari tujuan keempat di TPB mengenai pendidikan, karena masih banyak penduduk di berbagai negara yang tidak memiliki dua kemampuan dasar ini. Selain itu, pendidikan harus diterima oleh seluruh manusia terlepas dari umur dan gender. Tidak hanya anak-anak usia dini, lanjut usia pun perlu menerima pendidikan yang mampu menunjang kehidupan di masa tua.

Indonesia menunjukkan kontribusinya dalam pencapaian tujuan ini melalui beberapa program KSS seperti program beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada peserta-peserta dari negara-negara berkembang. Beasiswa yang dikhususkan untuk negara-negara berkembang difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dilaksanakan dari 1 Agustus 2018 hingga 2021. Dalam tajuk kegiatan Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (BKNB) kegiatan ini melibatkan 149 peserta dari negara-negara Asia, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia. Beasiswa yang juga diadakan pada periode waktu ini adalah "AUN/SEED-Net-JICA Scholarship" yang lebih banyak melibatkan negara-negara Asia, seperti Kamboja, Myanmar, Laos, Timor Leste, Malaysia, dan Vietnam.



**Gambar 9.** Renovasi Queen Victoria School di Fiji dari Pemerintah RI pada tahun 2020

Di dalam beasiswa ini, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga turut terlibat sebagai instansi pelaksana kegiatan. Selain itu, Indonesia juga memiliki program beasiswa seperti Darmasiswa dan Beasiswa Unggulan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan melibatkan peserta dari berbagai negara berkembang, seperti Timor Leste, Papua Nugini, Fiji, dan Ethiopia.

Komitmen Indonesia selain ditunjukkan dengan pemberian beasiswa, dilakukan juga dengan pemberian hibah sebesar IDR 20,77 miliar untuk Fiji. Dana hibah ditujukan untuk pembangunan sekolah Queen Victoria School tahap II. Hal ini merupakan komitmen lanjutan Indonesia setelah sebelumnya memberikan bantuan untuk renovasi sekolah tersebut (tahap I) di tahun 2019. Pada tahap I, hibah digunakan untuk renovasi ruang kelas asrama pelajar yang memerlukan perbaikan akibat adanya bencana badai Winston yang melanda Fiji.

Perhatian Indonesia terhadap negara-negara di kawasan Pasifik tidak berhenti di Fiji. Sebelumnya, di tahun 2019 Indonesia memberikan hibah kepada Pemerintah Kepulauan Solomon dalam pembangunan stadion multifungsi pertama yang diperuntukkan untuk kegiatan *Pacific Games 2023*. Kesepakatan pemberian hibah ini dituangkan dalam *Grant Agreement for the Development of a Multifunctional Futsal Field for the 2023 Pacific Games in the Solomon Island* antara Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Perdagangan Kepulauan Solomon Jeremiah Manele di sela-sela pertemuan *12th Bali Democracy Forum* pada 5 Desember 2019 (Redaksi AsiaToday, 2019).

Pembangunan stadion ini sendiri tuntas diresmikan pada September 2022 yang secara seremonial dilakukan oleh PM Kepulauan Solomon H.E Manesseh D Sogarave dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno L.P. Marsudi. Pembangunan stadion tersebut dilakukan oleh PT Wijaya Karya dari Indonesia yang menunjukkan KSS memberikan ruang bagi BUMN Indonesia untuk go-global (LDKPI, 2022).

Komitmen Indonesia dalam aspek pendidikan selain dalam bentuk hibah, juga dapat terlihat dalam pemberian sejumlah skema beasiswa seperti Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI), Beasiswa Kerja Sama Negara Berkembang (KNB) dan Beasiswa



**Gambar 10.** Pemberian Hibah dari Pemerintah RI Berupa Stadion Multifungsi kepada Kepulauan Solomon pada 2019

Darmasiswa. Berbeda dengan BSBI yang dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri, Beasiswa KNB dan Darmasiswa dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

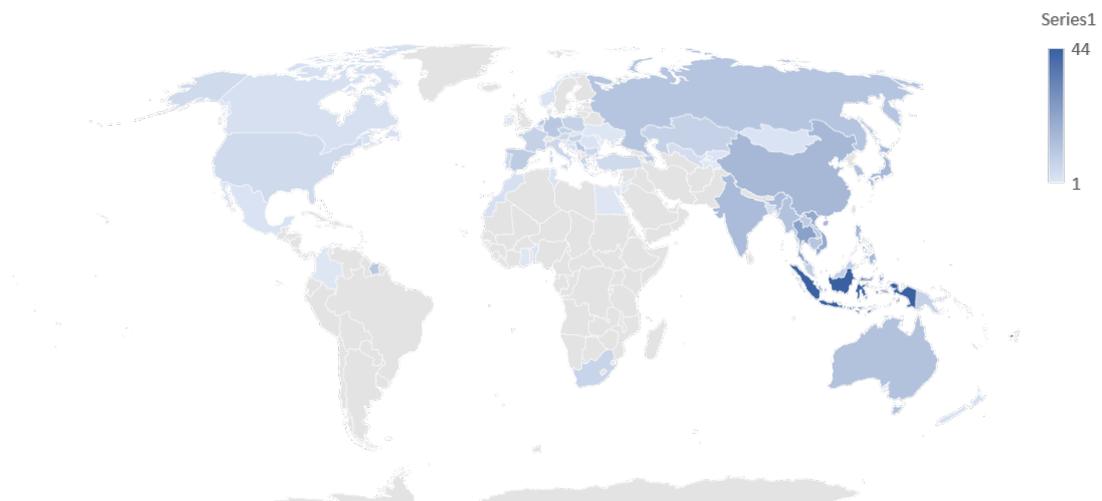
Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) diberikan sejak 2003. Kegiatan ini ditujukan untuk memperkenalkan ragam kebudayaan Indonesia. Dari program ini akan lahir *Friends of Indonesia* yang penting dalam meningkatkan pemahaman dan kerja sama antar-negara melalui *people-to-people connection*. Sejak awal penyelenggaraannya hingga tahun 2022, program BSBI ini telah memiliki 926 alumni dari 77 negara sahabat (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022).

Dari peta peserta program BSBI tercatat bahwa peserta masih didominasi dari Asia (41,9%) disusul Eropa (25,9%), Australia dan Pasifik (17,7%), Amerika (4,9%), dan Afrika (2,6%). Hal ini menunjukkan adanya kesertaan dari seluruh kawasan dalam program BSBI yang menunjukkan adanya daya tarik dari publik internasional terhadap kekayaan seni dan budaya yang dimiliki oleh Indonesia.

Menariknya, di masa pandemi tahun 2021 kegiatan BSBI tetap dilangsungkan secara *hybrid*. Program BSBI virtual tahun 2021 tersebut diikuti oleh 47 peserta dari 21 negara. Kesertaan dari kegiatan tersebut juga melibatkan berbagai sanggar kesenian sebagai instruktur pelatihan, di antaranya adalah Sanggar Tari dan Musik Sofyani (Padang), Gubang Art Community (Tenggarong, Kutai Kartanegara), Kazaki Art School (Makassar), Sanggar Seni Semarandana (Bali), Sanggar Langlang Buana (Banyuwangi), Sanggar Kinanti Sekar (Yogyakarta).

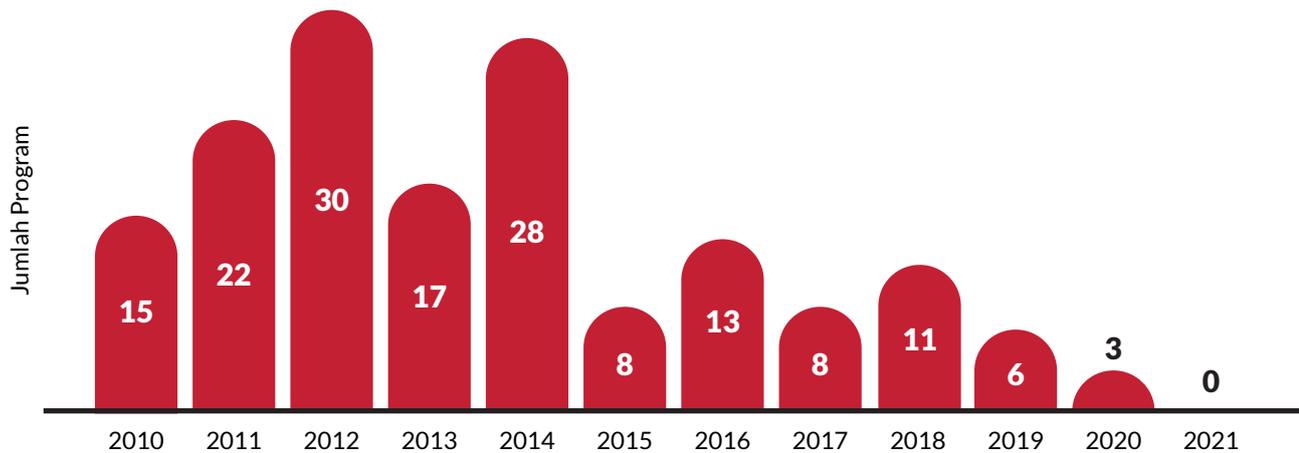
Namun demikian, program BSBI sempat tidak diadakan pada tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi. Kegiatan tersebut digantikan dengan berbagai kegiatan terkait dengan BSBI seperti “Indonesian Arts and Culture Scholarship Alumni Talk” (Juli, 2020), dan video kolaborasi lagu tema BSBI dengan judul “Indonesia.. Hatiku.. Rumahku.. Bangsaku..” (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2021).

**Daftar Peserta Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia 2011-2021**



**Gambar 11.** Peta Sebaran Peserta Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia Tahun 2011-2021  
 Sumber: Australian Bureau of Statistics, GeoNames, Microsoft, Navinfo, OpenStreetMap, Tomtom

## Program KSS yang Dikategorikan sebagai Tujuan 4 TPB



Bagan 4. Program KSS Indonesia untuk TPB ke-4 Periode 2010-2021

Sumber: Olahan Penulis dari Data Laporan Tahun KSS Indonesia tahun 2010-2021/berbagai sumber

## MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN

Kesetaraan gender masih menjadi permasalahan global. Di berbagai negara masih terdapat diskriminasi, kekerasan di ruang publik (perdagangan orang dan eksploitasi seksual), praktik perkawinan yang berbahaya (perkawinan usia anak, dini, dan paksa), dan sedikitnya ruang bagi perempuan untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik, ekonomi, dan masyarakat (Bappenas, 2020). Termasuk salah satunya, di negara Selatan, negara dengan tingkat pendidikan dan literasi yang rendah, kesetaraan gender kerap terjadi.

Melalui TPB ke-5, negara-negara bekerja sama merancang kerangka hukum yang menghapus diskriminasi, mengawasi praktik pernikahan, mengelola pekerjaan rumah tangga, mendorong akses perempuan dalam suatu lembaga, mendorong jaminan untuk perempuan dan laki-laki untuk akses yang setara terhadap pendidikan dan kesehatan, mendorong persamaan hak kepemilikan properti, dan meningkatkan kesetaraan gender serta memberdayakan perempuan (Bappenas, 2020).

Indonesia, dalam isu kesetaraan gender telah meluncurkan berbagai kerja sama serta program-program kolaborasi untuk membantu negara-negara Selatan. Bersama dengan berbagai mitra internasional, seperti *United Nations Development Programme* (UNDP) dan *United States Agency for International Development* (USAID), kerja sama yang diluncurkan tersebut bertujuan untuk meningkatkan derajat kesetaraan gender di tengah masyarakat negara-negara Selatan seperti Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, Papua Nugini, hingga Fiji. Pelaksanaan program dikerjakan oleh berbagai kementerian, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Pertanian, dan Kementerian Sekretariat Negara, sebagai lembaga penanggung jawab terhadap berlangsungnya dan kualitas program tersebut.

Sejak tahun 2010 hingga 2021, Indonesia telah meluncurkan 17 program kerja sama yang dirancang khusus untuk meningkatkan derajat kesetaraan gender, mulai dari pelatihan bersama, pengiriman pakar dan ahli, pemagangan, hingga pengadaan rangkaian sesi berbagi dengan sesama perempuan Indonesia. Setiap program kerja sama dilakukan dengan tema-tema variatif yang berkaitan langsung dengan permasalahan-permasalahan perempuan.

Sebagai contoh, kerja sama terakhir yang telah dilakukan oleh Indonesia adalah “*Sharing Best Practices*”

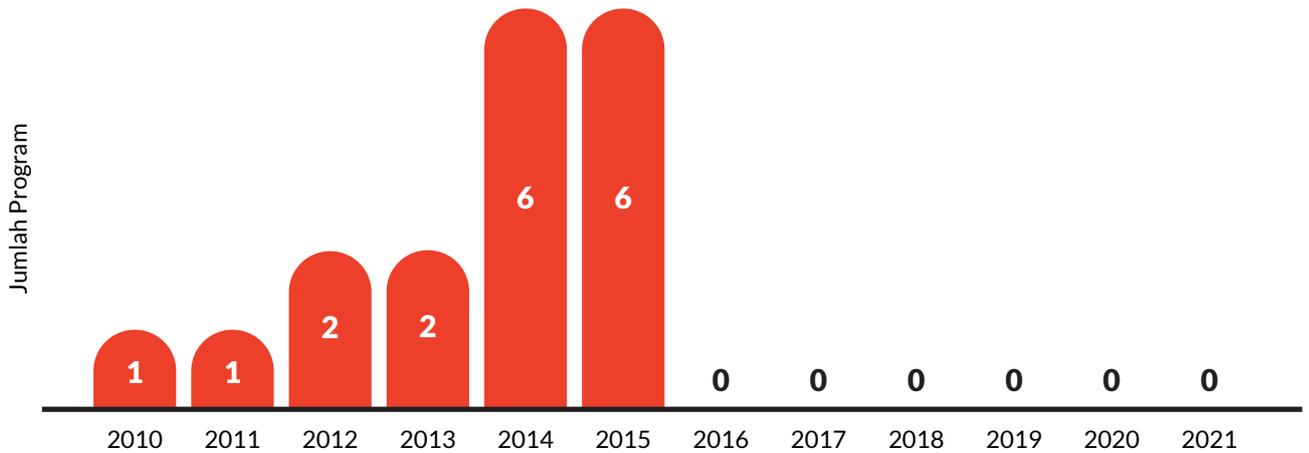
on Prevention of Violence against Women an Assistance for Women and Child Protection” pada tanggal 5 Oktober hingga 9 Oktober 2015. Kerja sama ini dilaksanakan di bawah pemantauan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan dihadiri oleh 18 peserta dari Afghanistan.

Peran aktif Kementerian PPPA kerja sama dengan Kementerian Sekretariat Negara juga ditunjukkan dengan penyelenggaraan *Training of Trainer of Gender Responsive Planning and Budgeting for Fiji Development Official* di tahun 2017. Kegiatan ini sendiri diadakan dengan dukungan dari USAID (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2017). Penyelenggaraan kegiatan tersebut merupakan implementasi dari *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Kementerian PPPA Indonesia dengan Kementerian Perempuan, Anak-Anak dan Pengentasan Kemiskinan Republik Fiji terkait dengan penguatan kapasitas di bidang pengarusutamaan gender.



Gambar 12. Pelatihan Kesetaraan Gender bagi Delegasi Afghanistan (2018)

### Program KSS yang Dikategorikan sebagai Tujuan 5 TPB



Bagan 5. Program KSS Indonesia untuk TPB ke-5 Periode 2010-2021  
 Sumber: Olahan Penulis dari Data Laporan Tahun KSS Indonesia tahun 2010-2021/berbagai sumber



## BAB 3

# Kemakmuran untuk Semua

Dari tahun 2010 hingga 2021, telah dilaksanakan

9

Program Kerja Sama  
Selatan-Selatan untuk  
TPB 7

15

Program Kerja Sama  
Selatan-Selatan untuk  
TPB 10

55

Program Kerja Sama  
Selatan-Selatan untuk  
TPB 8

18

Program Kerja Sama  
Selatan-Selatan untuk  
TPB 11

67

Program Kerja Sama  
Selatan-Selatan untuk  
TPB 9

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dihadirkan untuk tidak hanya membahas permasalahan “manusia” tetapi juga memberikan perhatian terhadap aspek “kemakmuran.” Dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan perkembangan teknologi yang sejalan dengan alam, kemakmuran diusahakan untuk hadir supaya umat manusia dapat menjalani kehidupan dan memenuhi potensi yang dimilikinya dengan baik. Hal ini juga termasuk mengatasi fenomena kesenjangan yang dapat menghalangi proses menuju kemakmuran global.

Indonesia melalui program KSS telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti pelatihan teknis, pemagangan, beasiswa, dan lainnya. Bab ini mengelaborasi kontribusi KSS Indonesia terhadap upaya pencapaian TPB untuk pilar “kemakmuran” yang meliputi isu energi, pekerjaan dan ekonomi layak, inovasi-teknologi sampai dengan ketimpangan dan kota-komunitas yang berkelanjutan.

## **MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN, DAN MODERN UNTUK SEMUA**

Terlepas dari peningkatan kebutuhan energi dunia, agenda pembangunan global mendorong pemanfaatan energi ramah lingkungan. Banyak industri dan masyarakat yang masih menggunakan sumber daya energi yang tidak efektif dengan jumlah gas emisi yang lebih besar dibandingkan dengan energi yang dihasilkan. Dengan demikian, kerja sama global dalam mengupayakan energi bersih dan terjangkau menjadi suatu keniscayaan.

Melalui KSS, Indonesia telah melakukan berbagai program yang berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan energi, khususnya dalam penyediaan akses listrik di negara Selatan-Selatan. Dari tahun 2010 hingga 2021, Indonesia telah melakukan sembilan program kerja sama terkait pemenuhan TPB ke-7 ini, dengan bentuk kegiatan yang beragam, seperti lokakarya, pelatihan, kunjungan studi, hingga simposium internasional. Kegiatan tersebut dilakukan untuk membantu negara Selatan-Selatan, dengan semangat solidaritas mengupayakan akses listrik bagi masyarakat luas.

Program-program tersebut dilakukan di bawah koordinasi berbagai badan nasional dan lembaga kementerian seperti, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, hingga Yayasan IBEKA turut berpartisipasi dalam melaksanakan program-program tersebut. JICA sebagai mitra tercatat banyak terlibat dalam program-program tersebut.

Program yang telah dilaksanakan mendapatkan dukungan dan partisipasi yang besar dari negara-negara tujuan. Sebanyak 17 negara, sepanjang tahun 2010 hingga 2021, mulai dari Mesir, Kuwait, Mozambique, Sudan, Namibia, Kamboja, Laos, hingga Myanmar. Negara-negara tersebut mengiriskan delegasi dan peserta sebanyak kurang lebih 40 peserta dengan persebaran demografi yang beragam.

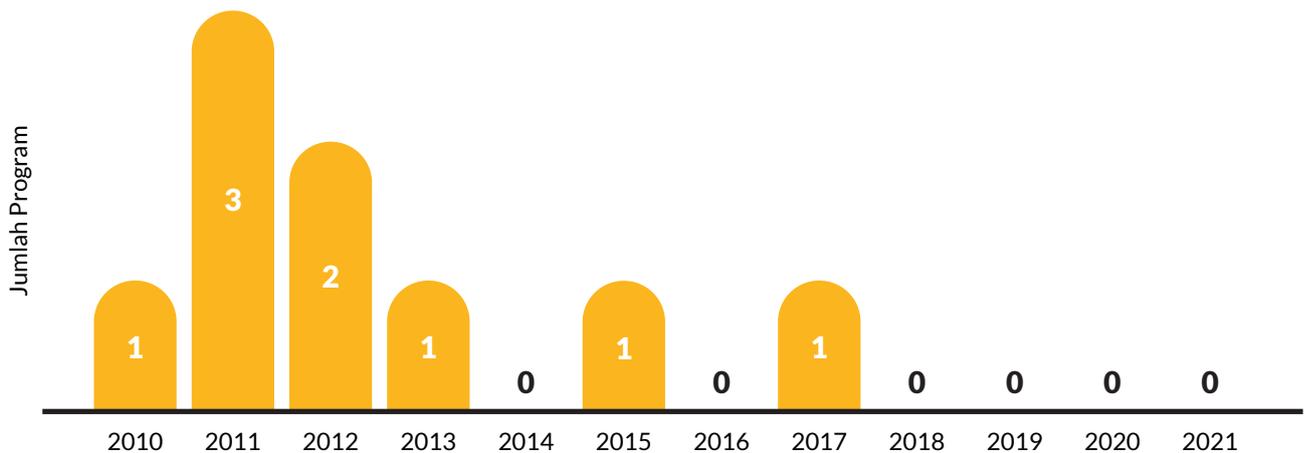
Terlepas dari peningkatan kebutuhan energi dunia, agenda pembangunan global mendorong pemanfaatan energi ramah lingkungan. Banyak industri dan masyarakat yang masih menggunakan sumber daya energi yang tidak efektif dengan jumlah gas emisi yang lebih besar dibandingkan dengan energi yang dihasilkan. Dengan demikian, kerja sama global dalam mengupayakan energi bersih dan terjangkau menjadi suatu keniscayaan.

Melalui KSS, Indonesia telah melakukan berbagai program yang berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan energi, khususnya dalam penyediaan akses listrik di negara Selatan-Selatan. Dari tahun 2010 hingga 2021, Indonesia telah melakukan sembilan program kerja sama terkait pemenuhan TPB ke-7 ini, dengan bentuk kegiatan yang beragam, seperti lokakarya, pelatihan, kunjungan studi, hingga simposium internasional. Kegiatan tersebut dilakukan untuk membantu negara Selatan-Selatan, dengan semangat solidaritas mengupayakan akses listrik bagi masyarakat luas.

Program-program tersebut dilakukan di bawah koordinasi berbagai badan nasional dan lembaga kementerian seperti, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, hingga Yayasan IBEKA turut berpartisipasi dalam melaksanakan program-program tersebut. JICA sebagai mitra tercatat banyak terlibat dalam program-program tersebut.

Program yang telah dilaksanakan mendapatkan dukungan dan partisipasi yang besar dari negara-negara tujuan. Sebanyak 17 negara, sepanjang

## Program KSS yang Dikategorikan sebagai Tujuan 7 TPB



Bagan 6. Program KSS Indonesia untuk TPB ke-7 Periode 2010-2021

Sumber: Olahan Penulis dari Data Laporan Tahun KSS Indonesia tahun 2010-2021/berbagai sumber

tahun 2010 hingga 2021, mulai dari Mesir, Kuwait, Mozambique, Sudan, Namibia, Kamboja, Laos, hingga Myanmar. Negara-negara tersebut mengirimkan delegasi dan peserta sebanyak kurang lebih 40 peserta dengan persebaran demografi yang beragam.



### **MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA**

Semangat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan pekerjaan yang layak didasari pada keadaan melambatnya pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita global. Berdasarkan data PBB, pertumbuhan PDB per kapita global melambat sejak tahun 2010 disebabkan oleh menurunnya PDB per tenaga kerja. Penurunan PDB per kapita global ditandai oleh adanya perbedaan yang tinggi antara PDB pekerja di negara kawasan berkembang dengan PDB pekerja di negara kawasan maju dan peningkatan

jumlah pengangguran mulai tahun 2009, khususnya tenaga kerja anak di Afrika (United Nations, 2022).

Selain itu, dalam kurun waktu 2011 hingga 2014, berdasarkan data PBB terdapat ketimpangan akses keuangan antara kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan berpendapatan menengah ke atas dengan perbedaan sebesar 14%. (United Nations, 2022). Padahal akses layanan keuangan merupakan komponen penting dari pertumbuhan inklusif, memastikan kemampuan semua pihak untuk mendapatkan modal memulai kegiatan usaha. Oleh sebab itu, menurut PBB, meningkatkan produktivitas tenaga kerja (GDP pekerja), mengurangi tingkat pengangguran di usia muda, dan meningkatkan akses untuk pelayanan keuangan, merupakan komponen yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif (United Nations, 2022).

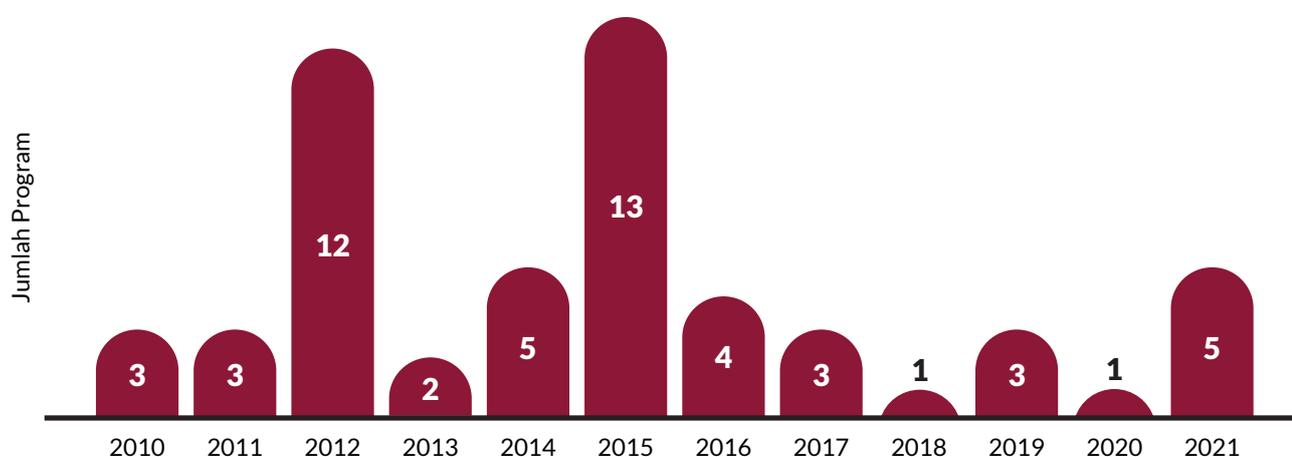
Permasalahan kurangnya lapangan kerja yang memadai untuk para tenaga kerja dihadapi oleh semua negara, tetapi negara Selatan cenderung memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Berdasarkan data *International Labour Organization* (ILO), angka pengangguran dunia mencapai 5,8% dengan peningkatan sebanyak 700 ribu jiwa yang menjadi pengangguran pada tahun 2015 (ILO, 2016, p.12). Indonesia pun pada tahun tersebut memiliki 7,3 juta jiwa pengangguran (ILO, 2016, p.13). Sebagai salah satu

negara yang menghadapi masalah tingginya tingkat pengangguran, Indonesia ikut serta dalam berbagai bentuk kerja sama dengan negara lain, untuk bersama-sama meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan yang layak dana meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Indonesia memanfaatkan skema KSS untuk berperan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Indonesia mengadakan sejumlah program atau kegiatan yang berfokus pada mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja produktif dengan pekerjaan yang layak untuk semua masyarakat.

and Strategic Investment Timor Leste, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kewirausahaan, IPB, Induk Koperasi Kredit (INKOPDIT), Centre for Economic Social Study (CESS), Balai Pelatihan Pertanian (BBPP), Bank Mandiri, Bank BRI, Multi Media Training Center (MMTC), The National Archives of the Republic of Indonesia (ANRI), Singosari National Artificial Insemination Centre (SNAIC), Universitas Ciputra Entrepreneurship Centre, River Basin Water Resources Utilization Project (RBWRU) Cambodia, dan Air Navigation Administration Timor Leste (ANATL)). Berbagai negara secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan program-program KSS Indonesia terkait

## Program KSS yang Dikategorikan sebagai Tujuan 8 TPB



Bagan 7. Program KSS Indonesia untuk TPB ke-8 Periode 2010-2021  
 Sumber: Olahan Penulis dari Data Laporan Tahun KSS Indonesia tahun 2010-2021/berbagai sumber

Terdapat 55 program KSS Indonesia yang telah dijalankan dalam mendorong tercapainya tujuan ini. Pelaksanaan program-program tersebut dibantu oleh sejumlah lembaga pemerintah (Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian KUKM, Kementerian Perindustrian, Yayasan Amal Masyarakat Petani Indonesia (YAMPI), Kementerian Perdagangan, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Perindustrian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pertanian Gambia, Kantor Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Pemerintah Provinsi Papua, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi) dan non-pemerintah Indonesia (Balai Inkubator Teknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BIT-BPPT), Ministry of Planning

dengan TPB ke-8 ini. Dalam gambar berikut ini (Gambar 3.1) menunjukkan bahwa ada pemerataan secara kawasan yaitu dari Pasifik, Asia dan Timur Tengah, Afrika dan Amerika Latin. Hal ini terlihat dengan keragaman peserta kegiatan yang berasal dari kawasan Pasifik seperti dari Fiji, Kepulauan Marshal, Kepulauan Solomon, Kepulauan Palau, dan Vanuatu. Selain itu, dari kawasan Afrika termasuk yang mendominasi di antaranya berasal dari Burkina Faso, Eswatini, Ethiopia, Gambia, Ghana, Sudan, Tanzania, Pantai Gading, Uganda dan Zambia. Sedangkan dari kawasan Amerika Latin, Kolombia menjadi satu-satunya negara dalam kepesertaan program KSS Indonesia terkait TPB ke-8 ini.

Salah satu contoh program yang dilakukan adalah pengiriman tenaga ahli pertanian dan petani (*Dispatch of Expert on Agriculture to Africa*) ke Gambia yang

dilakukan oleh Indonesia pada tanggal 10 September 2011 sampai dengan 23 November 2011. Program ini dilakukan oleh Indonesia untuk membantu melakukan revitalisasi agrikultur dengan mengembangkan *Rural Farmers Training Center (ARF-TC)* di Gambia. ARF-TC di Jenoi, Gambia merupakan satu di antara dua ARFTC yang dibangun dan dikembangkan Indonesia sejak 1996 (Setiawanto, 2014).

Pada tahun 2014, Indonesia membantu Gambia dalam usaha peningkatan kapasitas bidang pertanian dengan mengirimkan lima unit traktor yang merupakan bagian dari bantuan 50 unit traktor tangan Indonesia yang diberikan kepada 7 negara Afrika meliputi Senegal, Tanzania, Ethiopia, Kenya, Zimbabwe, dan Mozambik.

Selanjutnya di tahun 2017, Indonesia juga mengirimkan para ahli untuk meningkatkan kapasitas SDM negara-negara Afrika di sektor pertanian dengan tajuk *International Training on Agricultural for African Countries* melalui kegiatan praktik pelatihan dan pertukaran pengalaman yang diadakan di Lembang, Jawa Barat. Dalam kegiatan tersebut, diikuti 12 peserta dari 11 negara Afrika yaitu Angola, Ethiopia, Gambia, Kenya, Madagaskar, Mozambik, Nigeria, Namibia, Tanzania, Sudan dan Zimbabwe. Materi pelatihan tersebut diberikan oleh Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) Cara Tani Kuningan dan Balai Pelatihan Penyuluhan Pertanian (BP3) Lembang (Tabloid Diplomasi, 2017).



**Gambar 13.** Pelatihan Pengelolaan Perikanan bagi Negara-Negara Timur Tengah dan Afrika  
Sumber: Direktorat KST Kementerian Luar Negeri

Selain kegiatan tersebut, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Luar Negeri RI menyelenggarakan pelatihan di bidang perikanan yang diikuti oleh 12 negara Afrika dan Timur Tengah yang bertempat di Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Ambon pada tahun 2017. Beberapa negara peserta dari kegiatan tersebut adalah Djibouti, Kenya, Madagaskar, Mozambik, Mauritania, Mesir, Namibia, Nigeria, Senegal, Sudan, Zimbabwe, dan Aljazair. Pelatihan ini mempraktikkan penggunaan alat penangkap ikan ramah lingkungan seperti perangkap bubu dan keramba jaring apung (KJA), teknik pengolahan produk hasil laut yang dikembangkan dan budidaya ikan hias (Tabloid Diplomasi, 2017).

## **MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF YANG BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI**

Seperti yang kita ketahui, bahwa pembangunan infrastruktur, dan perindustrian, dan inovasi merupakan permasalahan negara-negara Selatan yang masih berupaya diwujudkan. Permasalahan pembangunan infrastruktur di negara-negara Selatan disebabkan utamanya oleh kemampuan ekonomi negara-negara Selatan yang belum mampu untuk mencapai target pembangunan infrastruktur. Alhasil, masyarakat di negara Selatan tidak jarang menghadapi masalah sosial karena perebutan untuk mendapatkan infrastruktur yang memadai. Contohnya, Lebanon yang sedang menghadapi masalah besar pembangunan infrastruktur, karena adanya potensi terjadi perpecahan antara pengungsi dan masyarakat asli jika pemerintah hanya mengambil keputusan satu arah dalam pembangunan infrastruktur (The British Academy, 2019).

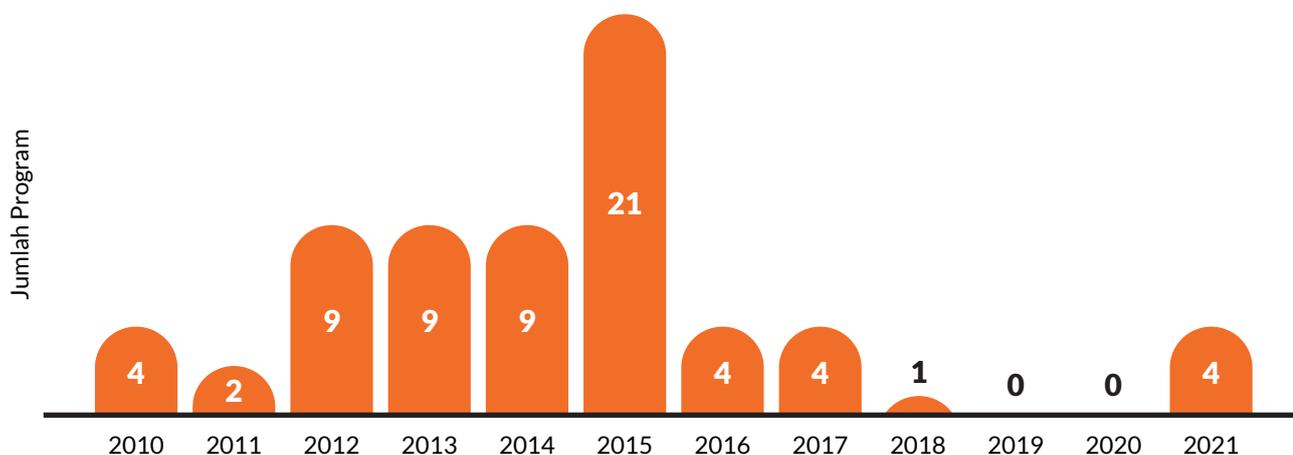
Sementara itu, kemampuan ekonomi yang lemah berdampak pada sulitnya peralihan ke industrialisasi dari negara Selatan. Manufaktur tradisional kemungkinan besar tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di masa depan negara Selatan,

sehingga negara Selatan secara perlahan harus mendorong industrialisasi (Canuto, 2018). Ditambah lagi, rendahnya inovasi teknologi di negara Selatan, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian TPB ke-9 menjadi sangat penting untuk mengembangkan infrastruktur, mewujudkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, mengembangkan kapabilitas teknologi sektor industri, mendukung pengembangan riset dan inovasi di negara berkembang, dan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi (Bappenas, 2020, 48-52).

Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga IBEKA berpartisipasi dalam melaksanakan program-program tersebut. Lembaga dan badan ini dibantu oleh beberapa lembaga internasional ternama, seperti JICA, ASEAN, dan UNDP. Program yang telah dilaksanakan mendapatkan dukungan dan partisipasi yang besar dari negara-negara tujuan. Sebanyak kurang lebih 50 negara, sepanjang tahun 2010 hingga 2021, mulai dari Mesir, Kuwait, Mozambique, Sudan, Namibia, Kamboja, Laos, Myanmar, hingga Timor Leste. Negara-negara tersebut mengirimkan delegasi dan peserta sebanyak kurang lebih 100 peserta dengan persebaran demografi yang beragam.

### Program KSS yang Dikategorikan sebagai Tujuan 9 TPB



**Bagan 8.** Program KSS Indonesia untuk TPB ke-9 Periode 2010-2021  
 Sumber: Olahan Penulis dari Data Laporan Tahun KSS Indonesia tahun 2010-2021/berbagai sumber

Indonesia, yang telah memahami betapa pentingnya inovasi bagi kemajuan bangsa, terus melakukan berbagai pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Tidak ingin bergerak sendiri, Indonesia juga melaksanakan berbagai macam program kerja sama internasional dengan negara-negara Selatan. Selama satu dekade, dari tahun 2010 hingga 2021, Indonesia telah melakukan sebanyak 67 program kerja sama internasional dengan aktivitas yang bervariasi, seperti pembangunan kapasitas, pelatihan, lokakarya, pengiriman tenaga ahli, hingga kunjungan studi.

Dengan jumlah kegiatan yang cukup banyak, program-program tersebut dilakukan dan dikepalai oleh berbagai badan nasional dan lembaga kementerian di Indonesia. Kementerian Luar Negeri, Kementerian



**Gambar 14.** Pelatihan Inseminasi Buatan kepada Palestina  
 Sumber: Direktorat KST Kementerian Luar Negeri

Sebagai contoh, pada tahun 2012, Indonesia melaksanakan sebuah program kerja sama internasional yang bertajuk “*International Training Workshop on Infrastructure for Afghanistan*” Kerja sama berisikan kegiatan pelatihan dan lokakarya ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan baik antara kedua negara dan menjadi medium dalam berbagi pengalaman terkait pembangunan jalan di Afghanistan. Dihadiri oleh lima puluh peserta, Indonesia membagikan pengalaman dan metode yang digunakan dalam membangun infrastruktur, mulai dari kebijakan, manajemen pembangunan, serta mekanisme pendanaan dan bisnis (Farizan & Heryadi, 2021).

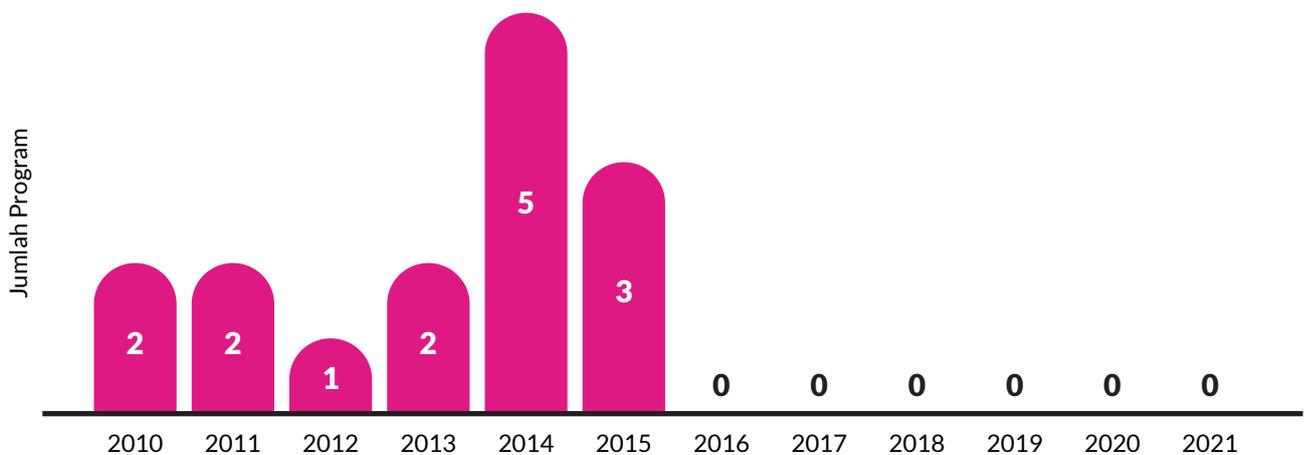
Masalah kesenjangan ini adalah masalah yang selalu ada di berbagai negara dari waktu ke waktu, tetapi kesenjangan yang tinggi terjadi di negara-negara Selatan. Negara Selatan menghadapi masalah pencapaian kemakmuran karena jutaan warga negara tidak mendapatkan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, yang mengakibatkan rendahnya kualitas dan harapan hidup mereka (Taaffe, 2015). Kesenjangan yang tinggi memberikan konsekuensi dalam berbagai bidang, antara lain konsekuensi politik (tidak memiliki akses untuk ikut serta dalam kegiatan politik), konsekuensi sosial (terjadinya konflik sipil), dan konsekuensi ekonomi (menghambat warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi) (Taaffe, 2015).

## **MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTARNEGARA**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-10, yaitu pengurangan kesenjangan di dalam dan antar negara, mencakup dua makna berbeda. Pertama, pengurangan kesenjangan di dalam negara, mencanangkan pengurangan kesenjangan dalam pendapatan berdasarkan umur, jenis kelamin, disabilitas, suku, ras, etnis, agama, atau status ekonomi dalam suatu negara (United Nations, 2021). Kedua, pengurangan kesenjangan antar negara mencakup ketidaksetaraan representasi, perlakuan terhadap imigran, dan bantuan pembangunan (United Nations, 2021).

Indonesia merupakan salah satu negara yang secara aktif berupaya keras untuk mengatasi masalah kesenjangan ini. Tercatat sejak tahun 2010-2021, terdapat sekitar 15 program kerja sama Indonesia dengan sejumlah negara Selatan yang berfokus untuk mengurangi kesenjangan. Negara-negara Selatan yang bekerja sama dengan Indonesia dalam program KSS yaitu Laos, Timor Leste, Tanzania, Bangladesh, Fiji, Papua Nugini, Bhutan, Iran, Malaysia, Maladewa, Myanmar, Nepal, Pakistan, Filipina, Sri Lanka, Vietnam, Afghanistan, dan Thailand. Pelaksanaan kegiatan dibantu oleh sejumlah lembaga pemerintah antara lain Kementerian Sekretariat Negara RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Bappenas), Kementerian Luar Negeri, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan

### **Program KSS yang Dikategorikan sebagai Tujuan 10 TPB**



**Bagan 9.** Program KSS Indonesia untuk TPB ke-10 Periode 2010-2021  
 Sumber: Olahan Penulis dari Data Laporan Tahun KSS Indonesia tahun 2010-2021/berbagai sumber

Perikanan (BPSDMKP), Kementerian PPPA, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Salah satu implementasi program dari pencapaian TPB ke-10 Indonesia yaitu “*Sharing Best Practices on Prevention of Violence Against Women and Assistance for Women and Child Protection*”. Program ini merupakan kerja sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Sekretariat Negara sebagai *National Gender Focal Point Colombo Plan* di Indonesia dengan dukungan Kementerian Perindustrian. Program yang diadakan di Yogyakarta pada tahun 2015 tersebut, didesain untuk Afghanistan dengan fasilitasi dari Colombo Plan. Setidaknya dalam program tersebut beberapa “*best practices*” terkait dengan: 1) implementasi jender mainstreaming, 2) implementasi ketersediaan “*safe house*”, 3) implementasi pemberian bantuan hukum, mediasi dan rekonsiliasi, 4) implementasi keterlibatan publik dan kelompok masyarakat, dan 5) implementasi pemberdayaan perempuan dan pengurangan kekerasan terhadap perempuan melalui industri rumah dan industri kecil menengah (Pemda Yogyakarta, 2015).



**Gambar 15.** Kegiatan *Sharing Best Practices on Prevention of Violence Against Women and Assistance for Women and Child Protection* untuk Afghanistan pada 2015

Sumber: Portal Resmi Pemerintah Daerah DI Yogyakarta

## **MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH, DAN BERKELANJUTAN**

Sebagian besar masyarakat dunia sekarang ini lebih memilih untuk tinggal di perkotaan, dengan alasan ekonomi, teknologi, dan transportasi yang lebih

berkembang, sehingga lebih menjamin kehidupan yang layak (United Nations, 2021). Hal ini berkontribusi terhadap ledakan jumlah penduduk di perkotaan yang mengakibatkan tidak terkontrolnya perluasan area pemukiman, baik yang layak tinggal ataupun tidak. Di negara Selatan, persentase pemukiman tidak layak tinggal cukup besar karena rendahnya daya beli hunian masyarakat dengan sokongan pemerintah yang terbatas (United Nations, 2021).

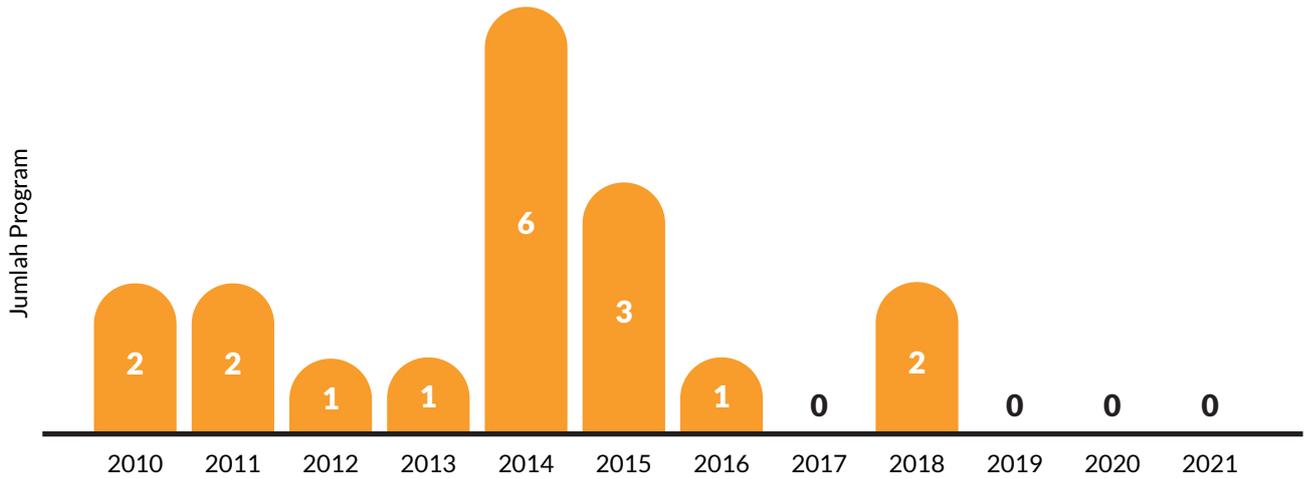
Area pemukiman yang tidak layak dan terlalu padat membawa banyak dampak negatif bagi masyarakat seperti polusi udara, tingginya limbah pembuangan sampah, sedikit ruang terbuka, mudahnya penyebaran penyakit, dan terhambatnya akses terhadap transportasi yang layak (United Nations, 2021). Area pemukiman yang tidak layak ini semakin meluas di negara Selatan selama masa pandemi, karena jatuhnya perekonomian masyarakat yang mendorong mereka mencari hunian lebih murah untuk menekan pengeluaran.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Indonesia melalui skema KSS telah terlibat dalam 18 program sejak tahun 2010-2018. Secara keseluruhan, program-program tersebut didukung oleh sejumlah lembaga Pemerintah Indonesia, antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pembangunan Umum, Kementerian Perhubungan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Serta lembaga non-pemerintah, yaitu *Japan International Cooperation Agency (JICA)*, *United Nations Populations Fund (UNFPA)*, *Timor-Leste National Police (PNTL)*, *Ministry of Planning and Strategic Investment Timor Leste*, *Ministry of Public Works, Transport, and Communications Timor Leste*. Terdapat total 28 negara yang menjadi peserta dalam program tersebut, antara lain Timor Leste, Bangladesh, Laos, Cook Island, Fiji, Nauru, Palau, Papua Nugini, Samoa, Vanuatu, Vietnam, Afghanistan, Bangladesh, Ethiopia, Ghana, Nepal, Niger, Pakistan, Filipina, Chad, India, Maladewa, Kenya, Madagaskar, Kepulauan Solomon, dan Tanzania.

Terdapat beberapa kegiatan yang telah dilakukan Indonesia melalui KSS untuk menunjang pengembangan kota sebagai tempat tinggal yang aman dan kokoh bagi manusia. Pada tahun 2011 dan 2012, dengan melibatkan peserta dari Timor Leste, Indonesia melakukan pelatihan terkait jalan. Di tahun 2011 dengan program *TCTP on Infrastructure in Road Sectors* dan di tahun 2012 dengan program *Workshop on Road System in Timor Leste*.

Program TCTP lain yang dilakukan Indonesia terkait pembangunan kota adalah *TCTP in Human Resources for Land Transportation (Vehicle Inspection Course and Transport Safety)* pada Juni 2014 yang melibatkan peserta dari Laos. Pelatihan lainnya dilakukan di Denpasar pada 28 Oktober hingga 5 November 2014 dalam tajuk *Workshop on Spatial Plan Technical Cooperation and Infrastructure in the field of Urban Development and Housing* dengan 9 peserta dari Fiji.

### Program KSS yang Dikategorikan sebagai Tujuan 11 TPB



**Bagan 10.** Program KSS Indonesia untuk TPB ke-11 Periode 2010-2021  
 Sumber: Olahan Penulis dari Data Laporan Tahun KSS Indonesia tahun 2010-2021/berbagai sumber



## BAB 4

# KSS Indonesia: Menjaga Bumi Kita

Dari tahun 2010 hingga 2021, telah dilaksanakan

8

Program Kerja Sama Selatan-Selatan untuk TPB 6

32

Program Kerja Sama Selatan-Selatan untuk TPB 14

73

Program Kerja Sama Selatan-Selatan untuk TPB 12

22

Program Kerja Sama Selatan-Selatan untuk TPB 15

25

Program Kerja Sama Selatan-Selatan untuk TPB 13



Gambar 16. TPB yang termasuk ke dalam pilar Planet/Bumi

Lingkungan hidup menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan setelah pembahasan di dalam pertemuan-pertemuan internasional, seperti *Rio "Earth" Summit* pada tahun 1992 dan *Johannesburg Summit on Sustainable Development* pada tahun 2002. Berbagai kesepakatan internasional dilakukan dalam merespons isu-isu lingkungan. Seperti *the United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) yang kemudian diadopsi dalam Protokol Kyoto pada tahun 1997 dan menjadi hukum internasional pada 16 Februari 2005. Pada tahun 2015, respons terhadap isu-isu lingkungan kemudian diteruskan dalam *Paris Climate Agreement*.

Bersamaan dengan berbagai inisiatif tersebut, isu lingkungan menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan agenda pembangunan global. Di dalam skema TPM, isu lingkungan dibahas pada tujuan ke-7 Sedangkan di dalam TPB, isu lingkungan muncul di beberapa tujuan, seperti pada TPB ke-6, ke-12, ke-13, ke-14, dan ke-15.

Dalam merespons pentingnya upaya menyelaraskan pembangunan dan keberlangsungan lingkungan (*sustainable development*), Indonesia secara aktif juga telah menjalankan program-program dalam kerangka KSS, kerangka kerja sama yang telah diakui sebagai salah satu mekanisme dalam mendukung tercapainya TPB 2030. Peran aktif Indonesia dapat terlihat dalam jumlah dan ragam program KSS yang diarahkan untuk pencapaian tujuan tersebut.

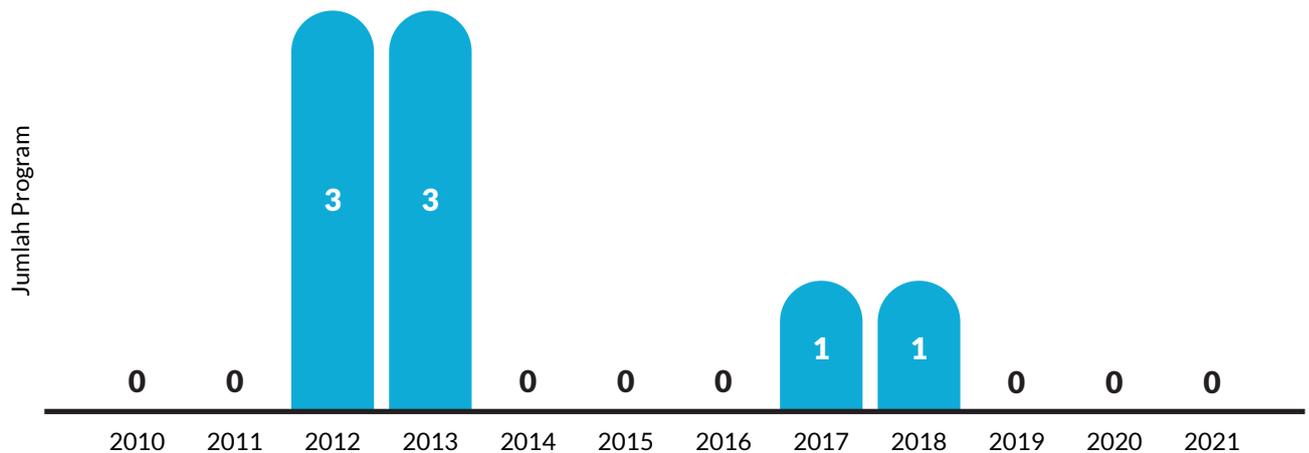


## **MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA**

Air bersih dan sanitasi menjadi kebutuhan dasar manusia. Akan tetapi, menurut data *World Health Organization* (WHO), setidaknya 829.000 orang meninggal di negara berpendapatan kecil dan menengah diakibatkan oleh rendahnya ketersediaan dan kualitas air serta persoalan sanitasi (World Health Organization, 2022). Tercatat 60 % kematian diakibatkan oleh diare yang faktor utamanya datang dari buruknya sanitasi. Lebih jauh, sanitasi yang buruk akan berdampak pada kesejahteraan manusia, pembangunan sosial dan ekonomi yang antara lain diakibatkan oleh hilangnya kesempatan atas pendidikan dan pekerjaan. (World Health Organization, 2022).

WHO juga mencatat bahwa lebih dari 2 miliar orang tinggal di wilayah yang kekurangan air, yang semakin buruk di beberapa wilayah akibat fenomena perubahan iklim dan peningkatan populasi (World Health Organization, 2022). Senada dengan hal tersebut, TPB UN juga mencatat bahwa untuk memenuhi target 2030 berkaitan dengan sanitasi, ketersediaan air bersih, dan kebersihan, dibutuhkan 4 kali lipat peningkatan laju perbaikan (United Nations, n.d.).

## Program KSS yang Dikategorikan sebagai Tujuan 6 TPB



**Bagan 11.** Program KSS Indonesia untuk TPB ke-6 Periode 2010-2021  
Sumber: Olahan Penulis dari Data Laporan Tahun KSS Indonesia tahun 2010-2021/berbagai sumber

Menyadari bahwa persoalan air bersih dan sanitasi banyak terpusat di negara-negara berkembang, Indonesia juga berupaya berkontribusi dalam mewujudkan TPB ke-6, tidak hanya untuk pencapaian target domestik melainkan juga untuk mendorong pencapaian target di negara-negara berkembang melalui skema KSS. Setidaknya terdapat 8 program terkait TPB ke-6 yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam rentang waktu 2012 hingga 2013 serta 2017 hingga 2018.

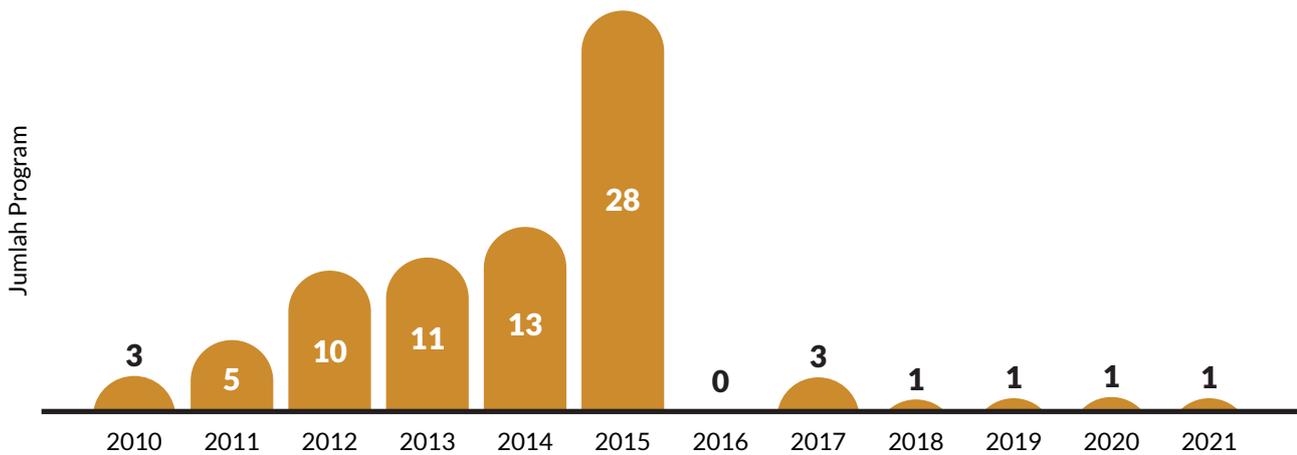
Pada tahun 2012, KSS Indonesia melaksanakan kegiatan *International Program on Water Management for Agriculture* dengan peserta dari Sudan, Madagaskar, Zimbabwe dan Indonesia, dan *International Training Program for Freshwater Aquaculture for Asian, African and Pacific Countries* yang melibatkan 19 peserta dari perwakilan kawasan tersebut seperti Kamboja, Laos, Sri Lanka, Timor Leste, Sudan, Tanzania, Namibia, dan Indonesia. Kemudian pada tahun 2018, KSS Indonesia melaksanakan program *Water Supply Training* dengan target negara penerima manfaat adalah Timor Leste.

## MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN

TPB ke-12 ditujukan untuk menjawab tantangan pengelolaan dan konsumsi pangan yang efisien, higienis dan berkelanjutan. Tujuan ini hadir sebagai respons atas tren pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan yang akan berdampak pada punahnya keanekaragaman hayati, polusi dan perubahan iklim. Sementara satu sisi, ketergantungan global terhadap sumber daya alam meningkat sebesar 65% dalam periode 2000-2019 (United Nations, n.d.).

KSS Indonesia sejak tahun 2010 telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan 12 tersebut. Kegiatan yang dilakukan Indonesia pun sangat bervariasi, antara lain *Training of Trainers for Participatory Training Program on Agricultural Extension Methodology* pada tahun 2010, *Indonesian Agriculture Support Program* pada tahun 2012, dan *Training Course on Functional Foods Diversification, Added Value, and Competitiveness on Agricultural Products through Zero Waste Processing System for Melanesian Spearhead Group/Pacific Countries* pada tahun 2015. Kegiatan tersebut dilakukan di berbagai negara berkembang, antara lain Timor Leste, Palestina, serta negara-negara di kawasan Pasifik Selatan seperti Fiji, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon.

## Program KSS yang Dikategorikan sebagai Tujuan 12 TPB



**Bagan 12.** Program KSS Indonesia untuk TPB ke-12 Periode 2010-2021

Sumber: Olahan Penulis dari Data Laporan Tahun KSS Indonesia tahun 2010-2021/berbagai sumber

Program-program yang dijalankan melibatkan berbagai institusi, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri, hingga instansi di luar pemerintahan, Universitas Pendidikan Indonesia. Adapun mitra pembangunan yang terlibat dalam kegiatan untuk pencapaian TPB ke-12 ini didominasi oleh JICA.

Dalam kaitan dengan upaya tersebut, Indonesia melalui program KSS sejak tahun 2010 tercatat telah melakukan 25 kegiatan yang ditujukan sebagai bentuk kontribusi Indonesia dalam pencapaian TPB ke-13 ini. Kegiatan yang dilakukan antara lain meliputi *International Training Program on Forest Rehabilitation* pada tahun 2010, *Capacity Development on Environment Impact Assessment among Indonesia, Timor-Leste and Japan* pada tahun 2013, *International Training on Disaster Risk Management for IORA Member Countries, Southern American Countries, and Caribbean Countries* pada tahun 2015, dan *Training of Trainers on Climate Field School for Colombo Plan Member Countries* pada tahun 2019.

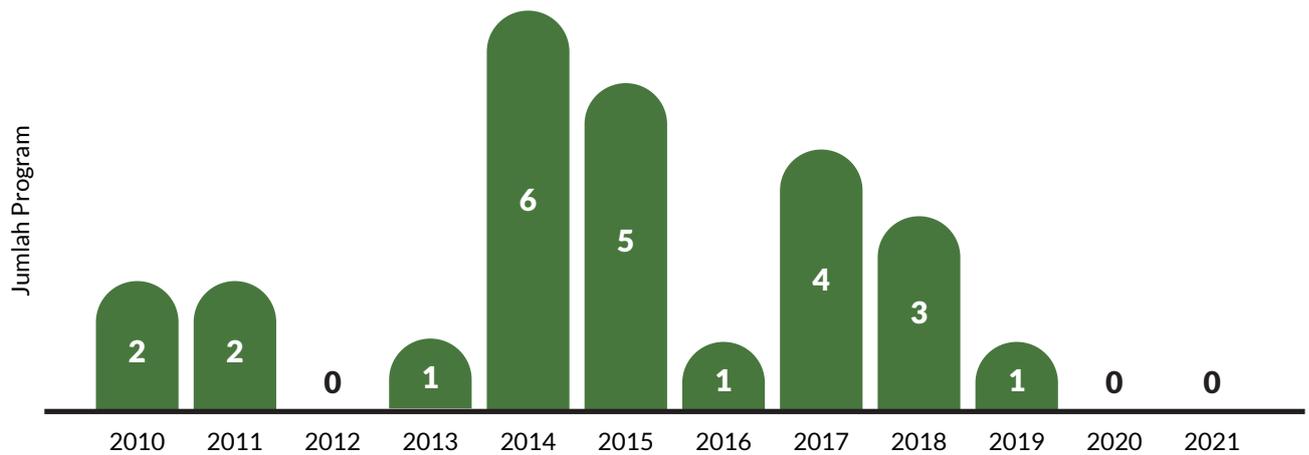
## MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA

Perubahan iklim menjadi salah satu isu utama dalam TPB karena dampak dari perubahan iklim sudah mulai terasa di hampir seluruh penjuru dunia. Negara-negara berkembang secara khusus merupakan negara yang rentan terdampak atas perubahan iklim tersebut. Fenomena perubahan iklim, seperti pemanasan global, diprediksi akan terus meningkat secara drastis dalam beberapa dekade ke depan, sehingga diperlukan upaya bersama untuk menangani dan/atau mengantisipasi dampak dari perubahan iklim ini seperti bencana alam gempa bumi tsunami, badai tropis dan banjir. Diperlukan biaya yang besar termasuk pengembangan pengetahuan dan teknologi untuk mengatasi dampak tersebut.



**Gambar 17.** Perjanjian Hibah kepada Mozambik dan Zimbabwe untuk Mitigasi Dampak Bencana Alam Topan Idai pada 13 April 2021

## Program KSS yang Dikategorikan sebagai Tujuan 13 TPB



Bagan 13. Program KSS Indonesia untuk TPB ke-13 Periode 2010-2021  
Sumber: Olahan Penulis dari Data Laporan Tahun KSS Indonesia tahun 2010-2021/berbagai sumber

### MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

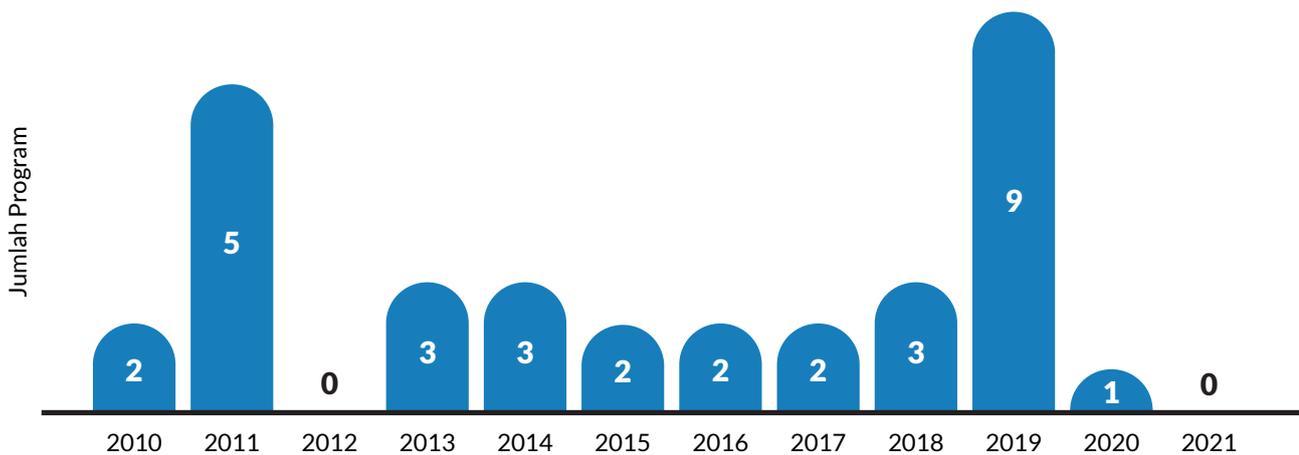
Menjaga ekosistem laut merupakan salah satu tujuan yang baru hadir dalam TPB sebagai salah satu tujuan agenda pembangunan global. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesadaran publik akan pentingnya ekosistem laut sebagai tumpuan kehidupan di masa depan. Berbagai upaya dilakukan tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga aktor masyarakat. Pemerintah dan aktor masyarakat secara bersama-sama memikirkan solusi dengan memobilisasi tindakan nyata untuk konservasi, perlindungan, dan keberlanjutan pemanfaatan laut. Berbagai program dirumuskan untuk menjaga ekosistem laut, mulai dari mengurangi pencemaran di laut baik dari sampah plastik maupun zat-zat kimia, alokasi anggaran untuk pelaksanaan penelitian pengembangan teknologi kelautan, hingga perlindungan terhadap nelayan kecil baik untuk akses terhadap sumber daya laut maupun pasarnya.

Terkait dengan tujuan menjaga ekosistem laut ini, KSS Indonesia sejak 2010 secara konsisten mengadakan

berbagai program dalam upaya menjaga kelestarian laut. Pada tahun 2010 terdapat dua kegiatan yang dijalankan yaitu *International Training Program on Handling Pests and Fish Diseases for Asian and Pacific Countries* dan *Third Country Training Program on Geo-Information for Spatial Decision Support System on Natural Hazard Management*. Berbagai program juga dijalankan dengan menyasar negara-negara di kawasan yang berdekatan langsung dengan laut seperti di kawasan Pasifik Selatan.

Pada tahun 2020, walau terjadi pandemi, Indonesia tetap secara aktif melaksanakan KSS Indonesia dengan melaksanakan kegiatan seminar secara virtual seperti *Webinar on Aquaculture Development for Shrimp, Sea Cucumber, and Seaweeds*. Total kegiatan yang dilaksanakan Indonesia berkaitan dengan menjaga ekosistem laut hingga tahun 2020 tercatat sebanyak 32 program dengan melibatkan berbagai institusi antara lain Direktorat Kerja Sama Teknik-Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, *United Nations Industrial Development Organization* (UNIDO), dan NAM-CSSTC.

## Program KSS yang Dikategorikan sebagai Tujuan 14 TPB



Bagan 14. Program KSS Indonesia untuk TPB ke-14 Periode 2010-2021

Sumber: Olahan Penulis dari Data Laporan Tahun KSS Indonesia tahun 2010-2021/berbagai sumber

### **MELINDUNGI, MERESTORASI, DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI**

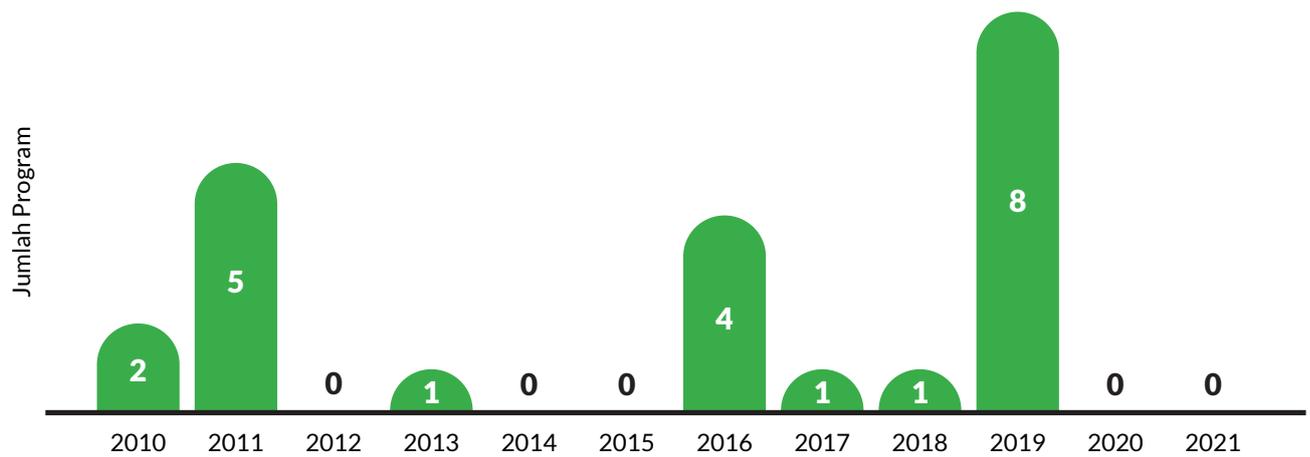
Sejalan dengan tujuan sebelumnya, menjaga ekosistem darat yang merupakan TPB ke-15 dan keduanya menjadi satu kesatuan yang merefleksikan upaya untuk menjaga Planet Bumi (Planet). TPB ke-15 ini dinarasikan sebagai upaya melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), menghambat dan membalikkan

degradasi tanah, serta mencegah berkurangnya keanekaragaman hayati (United Nations, n.d.). Kelestarian hutan dan terjaganya keanekaragaman hayati menjadi target utama dalam TPB ke-15 ini.

Hutan menjadi isu penting dalam agenda pembangunan global mengingat FAO menyatakan bahwa sejak tahun 1990 terjadi peningkatan luas dari hutan yang hilang atau *forest loss* (Food and Agriculture Organization, 2020). Kawasan yang paling mengalami fenomena hutan hilang yaitu kawasan Afrika (3,9 juta hektar yang kawasan hutan yang hilang) dan Amerika Selatan (2,6 juta hektar). Perlu dicatat bahwa kehilangan hutan akan mendorong terjadinya perubahan iklim dan begitu pun sebaliknya karena iklim yang memanas akan menyebabkan kekeringan yang bisa menghilangkan kawasan hutan.

Indonesia juga turut berperan aktif dalam pencapaian TPB ke-15 ini. Sebagai salah satu negara yang memiliki luas hutan terbesar dan keanekaragaman hayati, Indonesia memiliki kepentingan atas pelestarian ekosistem darat. Peran aktif Indonesia ditunjukkan melalui 22 program yang dijalankan sejak tahun 2010, dengan program terbanyak dilakukan pada tahun 2019 yaitu 8 program. Program tersebut antara lain *International Training Program on Ecotourism for Pacific Countries* pada tahun 2011, *Pelatihan Inventarisasi Hutan* pada tahun 2011, *Indonesia - India High Level Expert Exchange Fiscal Mechanism for Forest Conservation* pada tahun 2016, *Internship Rose Floriculture and Soil Development Expert Dispatch* pada tahun 2019.

## Program KSS yang Dikategorikan sebagai Tujuan 15 TPB



Bagan 15. Program KSS Indonesia untuk TPB ke-15 Periode 2010-2021

Sumber: Olahan Penulis dari Data Laporan Tahun KSS Indonesia tahun 2010-2021/berbagai sumber



## BAB 5

# Menguatkan Perdamaian, Tata Kelola, dan Kemitraan Global

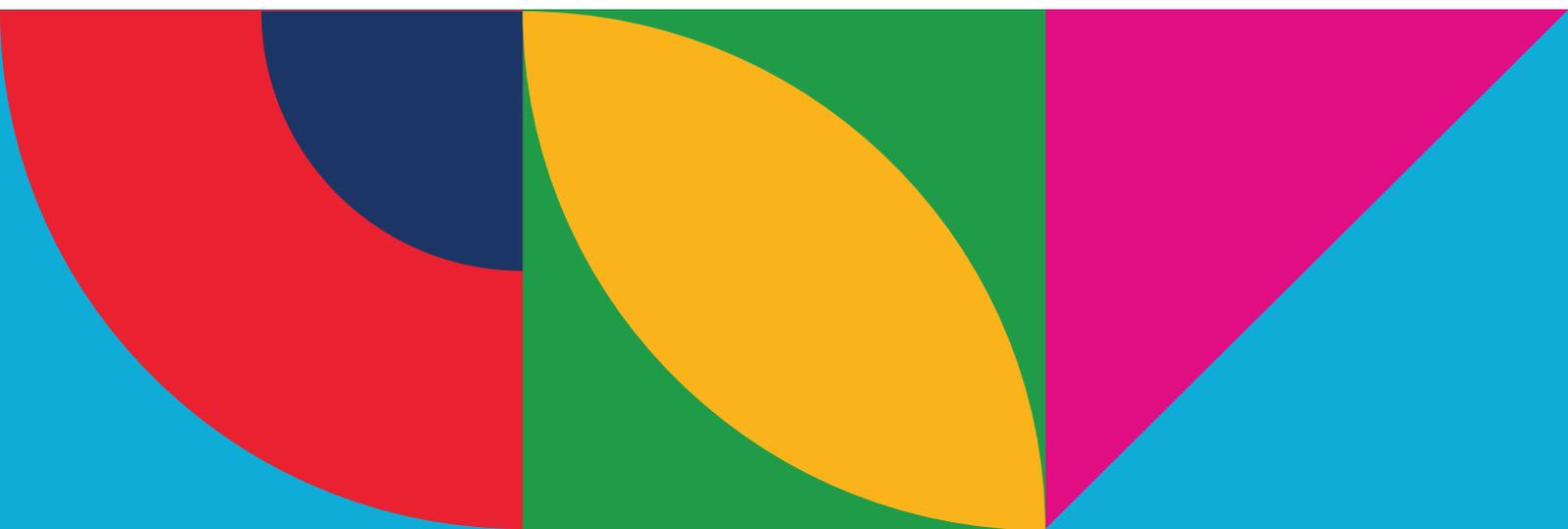
Dari tahun 2010 hingga 2021, telah dilaksanakan

71

**Program Kerja Sama  
Selatan-Selatan untuk  
TPB 16**

119

**Program Kerja Sama  
Selatan-Selatan untuk  
TPB 17**



Implementasi dari 14 TPB yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, tidak lengkap tanpa adanya TPB ke-16 yaitu usaha penguatan perdamaian, keadilan dan penguatan institusi serta TPB ke-17 dalam usaha peningkatan kemitraan global. Aspek penguatan perdamaian, keadilan dan penguatan institusi merupakan aspek penting dalam mendukung capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini serupa dengan aspek peningkatan kemitraan global. Hal tersebut penting dalam menjawab berbagai tantangan global hari ini. Penyelesaian tantangan-tantangan tersebut membutuhkan kerja sama berbagai pihak secara konstruktif dan berkelanjutan.

**MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN**

Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat termasuk ke dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, TPB ke-16. Aspek perdamaian menjadi substansi penting dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sejarah mencatat bahwa keberadaan perang dan konflik berkepanjangan memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia untuk dapat penghidupan yang layak, mendapatkan akses pendidikan yang baik, akses kesehatan dan hidup rasa aman dan nyaman tidak bisa dipenuhi jika hidup dalam suatu lingkungan yang penuh ancaman seperti perang dan konflik. Artinya, konflik, ketidakamanan, institusi yang lemah dan ditambah dengan terbatasnya akses kepada keadilan menjadi ancaman utama bagi pembangunan berkelanjutan (United Nations, n.d.).



Gambar 18. TPB ke-16 dan ke-17 dalam Menguatkan Perdamaian, Tata Kelola, dan Kemitraan Global

Absennya perdamaian dan keadilan memberikan dampak luar biasa. PBB mencatat bahwa Mei 2022 setidaknya 100 juta orang harus mengalami pemindahan paksa (*forcibly displaced*). Hal ini disebabkan oleh adanya konflik dan perang yang terjadi. Data tersebut meningkat 30 juta jiwa dari tahun 2018 terkait dengan mereka yang harus mengalami pemindahan paksa akibat dari perang dan konflik sebagaimana data yang dikeluarkan oleh UNHCR pada 2018 (United Nations High Commissioner for Refugees, 2019). Belum selesai masalah pemindahan paksa, masalah pelanggaran HAM terhadap pejuang hak asasi, jurnalis terjadi di 47 negara sebagaimana data PBB. Masalah lain yang penting diperhatikan misalnya adalah korupsi. Dari data PBB menunjukkan fakta bahwa korupsi menjadi masalah yang ditemukan di setiap kawasan di dunia. Fakta tersebut diperdalam dengan realitas bahwa 1 dari 6 bisnis menerima permintaan penyuapan dari negara (United Nations, n.d.).

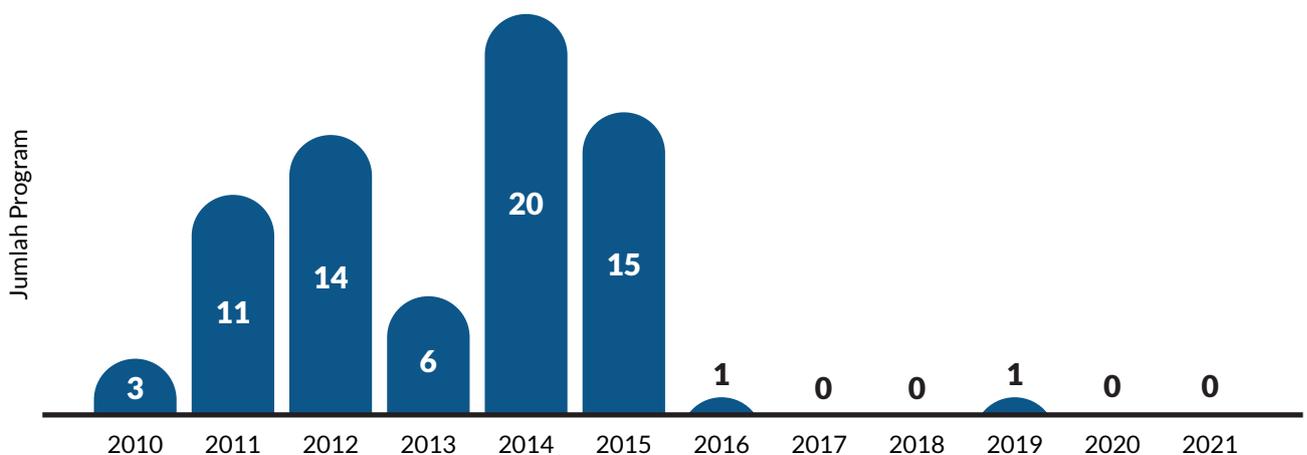
Aspek perdamaian ini berkelindan dengan aspek lain yang mendasar bagi kehidupan manusia yaitu kedaulatan dan kekuatan institusi yang ditunjukkan dengan usaha menjunjung tinggi supremasi hukum. Kita juga belajar bagaimana kemandekan atas pemenuhan aspek-aspek dasar manusia tersebut akan menjadi ganjalan besar dalam usaha pembangunan yang dilakukan (Seadstem, 2019).

Perlu dipahami bahwa dalam usaha mencapai TPB ke-16 ini, PBB membuat 12 target pencapaian dalam usaha mempromosikan perdamaian, keadilan dan supremasi hukum. Pertama, menurunkan kekerasan di mana pun (*reduce violence everywhere*). Kedua, perlindungan anak-anak dari eksploitasi, pencurian dan kekerasan (*protect children from abuse, exploitation, trafficking and violence*). Ketiga, mempromosikan aturan hukum dan memastikan akses setara terhadap keadilan (*promote the rule of law and ensure equal access to justice*). Keempat, perang terhadap kejahatan/kriminalitas terstruktur, aliran keuangan dan senjata gelap (*combat organized crime and illicit financial and arms flows*). Kelima, penurunan tingkat korupsi dan penyuapan (*substantially reduce corruption and bribery*). Keenam, mengembangkan institusi yang efektif, akuntabel dan transparan (*develop effective, accountable and transparent institutions*). Ketujuh, mendorong pengambilan keputusan di setiap level secara responsif, inklusif dan representatif (*ensure*

*responsive, inclusive, and representative decision making*). Kedelapan, memperkuat partisipasi dalam tata kelola global (*strengthen the participation in global governance*). Kesembilan, menyediakan identitas resmi universal (*provide universal legal identity*). Kesepuluh, mendorong adanya akses publik terhadap informasi dan perlindungan kepada kebebasan yang fundamental (*ensure public access to information and protect fundamental freedoms*). Kesebelas, memperkuat institusi nasional untuk mencegah kekerasan dan perang terhadap terorisme dan kriminalitas (*strengthen national institutions to prevent violence and combat terrorism and crime*). Kedua belas, promosikan hukum yang non-diskriminatif (*promote and enforce non-discriminatory laws and policies*) (The Global Goals, 2022).

Keberadaan TPB ke-16 ini tidaklah tunggal, melainkan memiliki relasi erat dengan tujuan lainnya. TPB ke-1 (*no poverty*), TPB ke-3 (*good health and well being*), TPB ke-4 (*quality education*), TPB ke-5 (*gender equality*), TPB ke-8 (*decent work and economic growth*), TPB ke-10 (*reduced inequalities*), TPB ke-11 (*sustainable cities and communities*), TPB ke-13 (*climate action*), dan TPB ke-17 (*partnerships for the goals*) memiliki relasi dengan TPB ke-16. Hal ini menunjukkan bahwa dalam usaha pencapaian dalam satu tujuan tertentu dalam TPB tidak dapat dicapai sendirian, sehingga membutuhkan ragam solusi dan kerja sama. Lebih lanjut, pencapaian

## Program KSS yang Dikategorikan sebagai Tujuan 16 TPB



Bagan 16. Program KSS Indonesia untuk TPB ke-16 Periode 2010-2021  
 Sumber: Olahan Penulis dari Data Laporan Tahun KSS Indonesia tahun 2010-2021/berbagai sumber

dalam satu tujuan tertentu juga menjadi pencapaian bagi tujuan lainnya (United Nations Indonesia, n.d.).

Secara konsisten, Indonesia berpartisipasi aktif dalam mendukung TPB ke-16 ini. Sejak 2010 telah diadakan sebanyak 71 kegiatan yang melibatkan berbagai institusi pelaksana dan beragam partisipan yang berasal dari negara-negara berkembang. Partisipasi ini menjadi gambaran bentuk komitmen Indonesia dalam mendukung TPB ke-16. Komitmen tersebut terlihat dalam kegiatan yang dilakukan Indonesia dalam satu dekade terakhir, meskipun jumlahnya fluktuatif, di setiap tahunnya selalu ada program-program terkait dengan usaha mencapai perdamaian, keadilan dan penguatan institusi.



Gambar 19. Pelatihan Anti-Korupsi dari KPK kepada Delegasi Afghanistan

## **MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Perkembangan dunia hari ini tidak bisa diselesaikan oleh satu dua negara. Kerja sama saat ini menjadi satu keniscayaan dalam usaha menyelesaikan berbagai isu global. Kerja sama antar negara telah mendorong berbagai bantuan pembangunan yang dalam rentang 2000 hingga 2014 telah mengalami peningkatan sebesar 66%. Namun demikian, konflik dan bencana alam yang berimbas kepada krisis kemanusiaan tidak berhenti yang terus menuntut adanya bantuan dan sumber-sumber finansial.

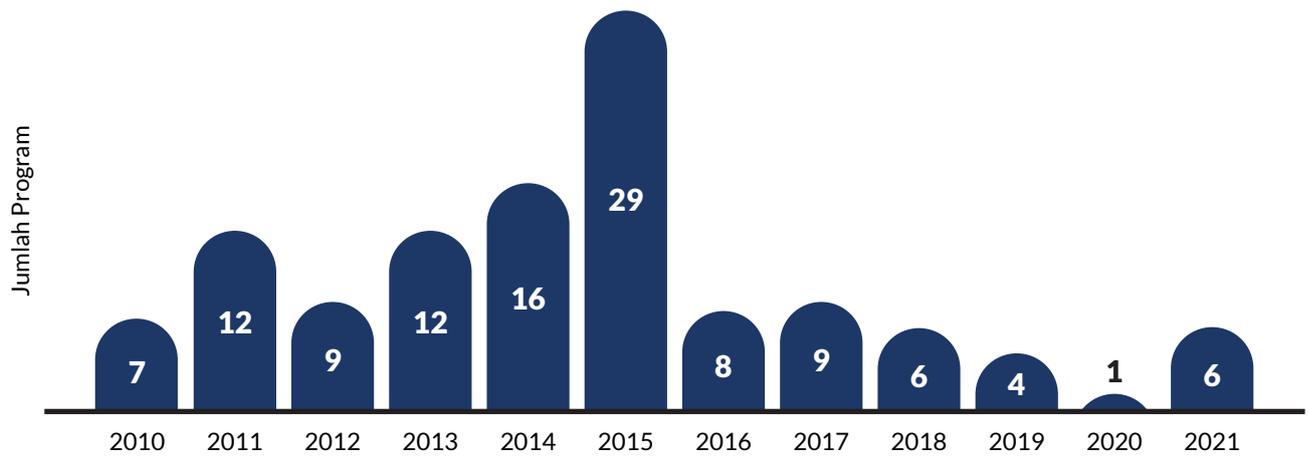
Realitas tersebut yang mendorong adanya keperluan dalam penguatan kerja sama baik dalam konteks Utara-Selatan maupun Selatan-Selatan yang tentunya ditujukan untuk mendukung capaian-capaian yang ada di dalam TPB. Keberadaan TPB ke-17 ini sangat erat dengan usaha dalam memperkuat solidaritas global untuk mencapai TPB 2030 (Bappenas, n.d.).

Usaha untuk mencapai TPB ke-17 ini tidak terbatas hanya melibatkan instansi pemerintah, seperti kementerian atau lembaga, dan instansi non-pemerintah saja melainkan juga mitra pembangunan. Keterlibatan pusat-pusat keunggulan menjadi warna tersendiri dari penyelenggaraan KSS Indonesia. Sebagai contoh, pusat keunggulan seperti *Tsunami Disaster Mitigation Research Center (TDMRC)* Universitas Syiah Kuala, Provinsi Aceh di bidang kebencanaan dan Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari di bawah Kementerian Pertanian dalam bidang inseminasi buatan. Selain itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga memberikan sumbangsih penting dalam kesuksesan KSS Indonesia. Seperti PT. Wijaya Karya yang menjadi salah satu BUMN di bidang jasa konstruksi yang turut andil dalam beberapa program KSS di Afrika.

Keberadaan mitra pembangunan substansial dalam perjalanan kegiatan KSS Indonesia. KSS tidak bisa begitu saja terlepas dari peranan negara-negara Utara. Skema kerja sama triangular merupakan kemitraan antara negara yang tergabung di dalam *Development Assistant Committee (DAC)* sebagai mitra pembangunan dan negara penyedia bantuan KSS untuk mengimplementasikan program kerja sama pembangunan di negara-negara penerima manfaat (Langendorf dan Leftwich, 2012, p. 25). Model kerja sama ini berusaha menjembatani antara paradigma Utara dan Selatan sehingga dapat menjadi model alternatif dalam relasi yang dibangun.

Kerja sama triangular ini dalam praktiknya menyertakan mitra pembangunan yang berupa badan kerja sama suatu negara, atau organisasi regional, ataupun organisasi multilateral. Beragam bentuk dari mitra pembangunan ini adalah USAID, UNDP, *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH* atau GIZ, IsDB, JICA, *Korean International Cooperation Agency (KOICA)*, *Colombo Plan*, dan mitra-mitra pembangunan lainnya yang turut terlibat di dalam mekanisme triangular KSS bersama Indonesia.

## Program KSS yang Dikategorikan sebagai Tujuan 17 TPB



**Bagan 17.** Program KSS Indonesia untuk TPB ke-17 Periode 2010-2021  
Sumber: Olahan Penulis dari Data Laporan Tahun KSS Indonesia tahun 2010-2021/berbagai sumber



## BAB 6

# *Build A Better World: Komitmen Indonesia untuk Pembangunan Masa Depan*

Sebagai salah satu bentuk kerja sama pembangunan antara negara berkembang, KSS juga dilihat sebagai salah satu instrumen dalam pencapaian TPB. Indonesia telah melakukan peranan aktif di dalam KSS hingga mendapatkan penghargaan atas kontribusinya dari UNECSAP dan UNOSSC. Akan tetapi, dampak dari COVID-19 yang merebak dan menghadirkan tantangan besar bagi pencapaian agenda TPB mendorong Indonesia untuk melakukan penyesuaian tujuan melalui pendekatan yang multidimensional dan multilevel. Beberapa rekomendasi yang dapat Indonesia pertimbangkan untuk pelaksanaan KSS adalah sebagai berikut. Pertama, KSS harus terus dimanfaatkan sebagai instrumen strategis yang penting dalam mencapai pencapaian TPB. Kedua, KSS Indonesia perlu terus membangun penguatan institusi, SDM, anggaran, dan program mengingat peran KSS yang semakin strategis. Ketiga, peningkatan peran non-pemerintah dan swasta perlu terus didorong untuk mendukung program KSS. Keempat, Indonesia perlu memperkuat dan memperluas kemitraan untuk kerja sama triangular. Terakhir, penyelenggaraan program KSS Indonesia harus dapat memberi manfaat politis dan ekonomi langsung, terlebih pada masa pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Agenda TPB telah menjadi acuan pembangunan nasional dan internasional, dengan 17 tujuan dan 169 target pembangunan yang merepresentasikan lima pilar pembangunan yaitu *People, Prosperity, Planet, Peace* dan *Partnership* dan prinsip “tidak ada satu pun yang tertinggal” (“*no one left behind*”). Atas dasar tersebut, TPB telah menjadi platform bersama dalam kebijakan pembangunan yang lebih komprehensif, terukur dan berkarakter, tidak sekadar sebagai upaya pertumbuhan ekonomi semata (*beyond-economic growth*).

Merespons hal tersebut, semua pemangku kepentingan (pemerintah dan kelompok masyarakat) baik di tingkat lokal maupun global, memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam mengimplementasikan TPB secara utuh. Kerja sama pembangunan melalui kemitraan juga menjadi salah satu instrumen dalam mencapai TPB, termasuk KSS di dalamnya.

KSS dipercaya sebagai salah satu instrumen dalam pencapaian TPB. Sebagai sebuah bentuk kerja sama pembangunan antar negara berkembang, KSS merupakan sebuah mekanisme pelengkap dari mekanisme kerja sama *North-South* yang selama ini mendominasi arsitektur pembangunan global.

KSS juga diakui sebagai sebuah mekanisme yang relevan dalam konteks kerja sama antar negara berkembang mengingat level pembangunan yang tidak jauh berbeda dan model kerja sama yang berorientasi pada target dan *cost effective development* serta kemitraan yang inklusif. Hal ini sejalan dengan agenda TPB yang meletakkan prinsip dasar pada “*leaving no one behind*.” Keterlibatan mitra ketiga dalam hal ini mitra pembangunan melalui mekanisme triangular menjadi pelengkap modalitas yang dimiliki skema KSS.

KSS Indonesia, seperti yang telah dipaparkan, telah menunjukkan peran aktifnya melalui keterlibatan dalam berbagai program yang secara langsung berkontribusi pada upaya tercapainya TPB. Peran aktif dan strategis Indonesia tersebut mendapatkan penghargaan dari Perserikatan Bangsa Bangsa yang diberikan oleh *United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific* (UNESCAP) dan *United Nations Office for South-South Cooperation* (UNOSSC) pada tanggal 12 September 2018 di Bangkok dalam peringatan “*Regional Commemoration of the United Nations Day for South-South Cooperation*.”



Gambar 20. Penganugerahan Indonesia atas Peran Aktifnya dalam KSS dari UNESCAP dan UNOSSC pada 2018

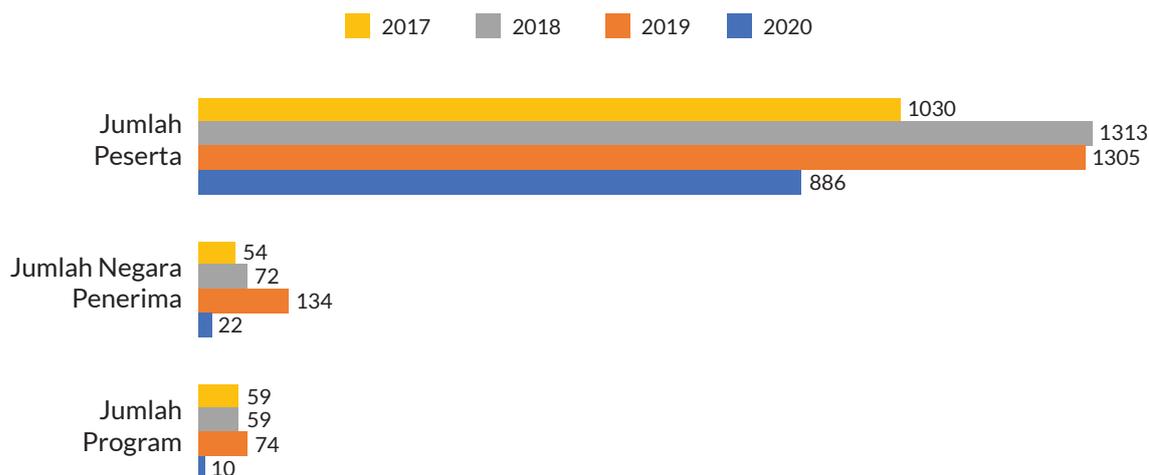
Program-program terkait pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, serta pertumbuhan ekonomi menjadi area-area utama (*flagship program*) KSS Indonesia.

Tabel 1. Fokus TPB KSS Indonesia Periode 2010-2020

Tahun	Fokus TPB KSS Indonesia
2010	4
2011	4,12,16
2012	4,9,10
2013	4,9
2014	2,4,12
2015	2,4,8,9,12,16
2016	4,9,16
2017	2,4,9
2018	4,8,9,12
2019	8,9
2020	3,4,5

Data pada tabel memperlihatkan bahwa KSS Indonesia berkontribusi hampir di semua tujuan dengan memfokuskan programnya pada pencapaian TPB ke-4 yaitu pendidikan berkualitas. Tentu hal ini dapat dipahami mengingat pembangunan akan berjalan jika didukung oleh kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional.

# Data Pelaksanaan Program KSS 2017-2020



**Bagan 18.** Tren Program KSS Indonesia tahun 2017 - 2020  
 Sumber: Olahan Penulis dari Data Laporan Tahun KSS Indonesia tahun 2010-2021/berbagai sumber

Dari data di atas, bisa dilihat terjadi peningkatan untuk jumlah negara penerima dan program KSST sebelum pembatasan perjalanan karena pandemi COVID-19 yang membuat penurunan program secara signifikan pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan peningkatan kepercayaan terhadap kapasitas Indonesia sebagai negara donor dalam melaksanakan program KSST. Dengan pandemi yang sudah melanda, Pemerintah Indonesia dapat mengembalikan level *outreach* yang sudah terbangun dengan membawa program yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Merebaknya COVID-19 pada akhir tahun 2019 yang menyebabkan seluruh negara di dunia mengalami kontraksi ekonomi, menghadirkan tantangan besar bagi tercapainya agenda TPB. Salah satu dampaknya adalah kesenjangan keuangan yang signifikan di banyak negara yang memperlemah kapasitas negara untuk menjalankan berbagai program TPB. Bersamaan juga muncul tantangan global dalam hal ketahanan pangan dan energi. Menyadari hal tersebut, KSS Indonesia seyogyanya dapat diarahkan untuk menjawab tantangan tersebut melalui pendekatan yang multidimensional dan multilevel, dalam upaya mewujudkan TPB, menuju dunia yang lebih baik dengan menerapkan prinsip inklusivitas, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Ke depan, ada beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk KSS Indonesia.

## **Pertama, KSS harus terus dimanfaatkan sebagai instrumen strategis yang penting dalam mencapai pencapaian TPB.**

Dengan melandainya pandemi, program pelatihan KSST mulai bisa kembali dilakukan secara fisik. Namun, dalam pelaksanaannya harus dibuat suatu analisis menyeluruh bersama Perwakilan RI untuk mendata kebutuhan dari negara resipien. Pemberian program harus bisa menjawab kebutuhan tersebut agar memiliki efek yang lebih luas bagi negara resipien.

Jika dilihat dari data pelaksanaan program hingga saat ini, program untuk mencapai TPB ke-1 perlu mendapat perhatian serius karena sulitnya mencapai tujuan tersebut, yaitu penghapusan angka kemiskinan ekstrem menjelang tahun 2030. Sedangkan TPB ke-4 yang selama ini menjadi prioritas tetap perlu dilanjutkan dengan melihat tingkat pendidikan serta kebutuhan industri agar program pelatihannya bisa langsung membawa dampak ekonomi. Beberapa perhatian khusus selanjutnya ditujukan pada program-program TPB yang dalam beberapa tahun terakhir tidak dilaksanakan, terutama TPB 5 dan TPB 10 (tidak ada kegiatan sejak 2016), dan TPB 7 (sejak 2017). Sedangkan program yang rutin dilaksanakan, seperti pada TPB 17 perlu dipertahankan bahkan dapat menjadi program unggulan.

Implementasi KSS Indonesia harus dilakukan dengan mempertimbangkan pemetaan prioritas untuk negara/kawasan, maupun pemetaan secara tematik. Dalam hal ini, *Mapping* Prioritas Negara Penerima dan Penyusunan dokumen kemitraan strategis seperti *country partnership strategy* (CPS) maupun *regional partnership strategy* (RPS) menjadi semakin penting sebagai bagian dari pemetaan kebutuhan KSS Indonesia. Dilihat dari kepentingan strategis di kawasan, KSS Indonesia di antaranya berkontribusi dalam rangka 1) penguatan peran dan kepemimpinan Indonesia di kawasan Indo-Pasifik, serta 2) pemenuhan komitmen dan upaya perluasan pasar non-tradisional di kawasan Afrika, Amerika Latin, dan Karibia. Pemetaan secara tematik contohnya, ketika Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB, maka terdapat beberapa program KSS yang diarahkan dalam kerangka tema bina damai.

### ***Kedua, KSS Indonesia perlu terus membangun penguatan institusi, SDM, anggaran dan program mengingat peran KSS yang semakin strategis.***

Untuk saat ini, program-program KSST yang dilaksanakan masih memiliki beberapa pendanaan dari Kementerian Teknis, dana hibah LDKPI, serta pendanaan dari Mitra Triangular. Dengan situasi tersebut, jika terdapat pemotongan anggaran di salah satu elemen pemberi pendanaan, program yang ada kemungkinan tidak bisa dilanjutkan. Hal ini harus bisa dihindari, karena keberlanjutan program sangat penting terhadap pengembangan kapasitas bagi negara resipien. Pengembangan kapasitas tidak bisa dilakukan dengan cepat, harus dilaksanakan dengan proses yang cukup panjang dan program yang berjenjang dari pemula hingga advance. Saran kebijakan yang bisa dilakukan adalah pendataan rencana hibah dan program yang lebih ketat dengan memberikan opsi pendanaan untuk melanjutkan program dalam skala kecil untuk keberlanjutan program. Dalam hal ini, LDKPI dapat memiliki peran yang lebih untuk pendanaan agar program yang dianggap esensial bisa terus dilaksanakan tiap tahun.

### ***Ketiga, peningkatan peran non-pemerintah dan swasta perlu terus didorong untuk mendukung program KSS.***

Selama satu dekade KSS Indonesia, produk-produk dari aktor-aktor non-pemerintah dan swasta semakin banyak memainkan peran penting, sehingga ke depannya kolaborasi aktor-aktor ini perlu diperkuat lebih jauh. Dalam hal ini, pelibatan BUMN juga harus terus dijalin untuk membantu pengembangan pasar dan kesempatan *outbound investment* di negara resipien. Selain itu, peningkatan kualitas dari pelatihan juga dapat didorong dengan memanfaatkan manajer program yang sudah memiliki pengalaman untuk melakukan proyek pembangunan di Indonesia. Ketersediaan sumber daya ini diharapkan dapat memberi nilai tambah dalam setiap proyek yang akan dilaksanakan. Untuk mendukung penciptaan lingkungan yang mendukung bagi keterlibatan aktor non-pemerintah, Pemri telah menyusun 2 (dua) dokumen kebijakan, yakni *Multi-Stakeholders Partnership* (MSP) *Guidelines* dan *Study on Non-State Actors Engagement*. Melalui kedua dokumen dimaksud, Pemri berupaya memetakan kapasitas, kontribusi, serta kebutuhan dari masing-masing aktor non-Pemerintah untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan KSS.

### ***Keempat, memperkuat dan memperluas kemitraan untuk kerja sama triangular.***

Pemerintah RI perlu meningkatkan kerja sama dengan negara maju dan organisasi internasional melalui kerja sama triangular. Terdapat sejumlah mitra pembangunan yang selama ini aktif bermitra dengan Indonesia, diantaranya UNDP, JICA, GIZ, USAID, IsDB, ADB, *Colombo Plan*, dan NAM CSSTC. Mitra triangular dapat membantu dalam pengiriman ahli untuk memberikan pelatihan serta *joint funding* untuk pelaksanaan proyek di berbagai negara. Hal ini harus tetap dilakukan dan kemudian dikuatkan dengan perluasan mitra pendanaan dari instansi filantropi yang memiliki berbagai paket pendanaan yang selaras dengan TPB. Selain itu, dalam memberikan pelatihan yang efektif, penyusunan program harus bisa melibatkan *UN Resident Coordinator* di wilayah strategis seperti Afrika dan Pasifik agar dapat melengkapi program yang mereka miliki yang nantinya bisa meningkatkan *impact* dari program KSST dari Indonesia.

***Dan kelima, penyelenggaraan program KSS Indonesia harus dapat memberi manfaat politis dan ekonomi langsung, terlebih pada masa pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.***

Sebagai contoh, Pemerintah RI sudah mengirimkan bantuan masing-masing senilai USD 150.000 ke Zimbabwe, Mozambique, serta Madagaskar. Untuk Zimbabwe dan Mozambique, sudah dikirimkan bantuan obat-obatan untuk pandemi dan korban Topan Idai dan bantuan hibah pendanaan untuk penanggulangan kelaparan di Madagaskar. Di wilayah pasifik, Pemerintah Indonesia memberikan hibah untuk penanganan pandemi COVID-19 yang diberikan kepada Fiji, Kepulauan Solomon, dan Timor Leste masing-masing sebesar IDR 2,88 miliar. Selanjutnya, bantuan tersebut akan digunakan untuk pengadaan alat-alat kesehatan yang di produksi oleh produsen Tanah Air. Khusus untuk Fiji, selain mendapatkan dana hibah untuk penanganan pandemi COVID-19, negara ini juga mendapatkan dana hibah sebesar IDR 20,77 miliar untuk pembangunan sekolah Queen Victoria School Tahap II. Sebelumnya Pemerintah RI juga telah memberikan bantuan untuk renovasi QVS tahap I di tahun 2019 yang digunakan untuk merekonstruksi ruang kelas dan asrama pelajar yang rusak karena badai Winston. Bantuan ini harus dikembangkan menjadi program pengembangan kapasitas karena pandemi sudah melandai.



# DAFTAR PUSTAKA

- Bapennas, Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan. (2017, July 26). *Indonesia dan UNDP Bekerjasama Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Mengatasi Ketimpangan dan Keberlanjutan* [Press release]. Retrieved November 18, 2022, from <https://bapennas.go.id/berita/indonesia-dan-undp-bekerjasama-mendukung-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-mengatasi-ketimpangan-dan-keberlanjutan-PQCoc>
- Bapenas. (2020). Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia: Pilar Pembangunan Ekonomi. Retrieved December 7, 2022, from <https://sdgs.bapenas.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Metadata-Pilar-Ekonomi-Edisi-II.pdf>
- Bapenas. (2020). Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Pilar Pembangunan Sosial. Retrieved December 7, 2022, from <https://sdgs.bapenas.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Metadata-Pilar-Sosial-Edisi-II.pdf>
- Canuto, O., & Kurowski, P. (2018, June 19). The future of manufacturing in the Global South: By Otaviano Canuto. Retrieved December 7, 2022, from <https://www.project-syndicate.org/commentary/manufacturing-transition-in-developing-economies-by-otaviano-canuto-2018-04>
- Cities and urban infrastructure of Global South to be stretched beyond breaking point. (2019, August 6). Retrieved December 7, 2022, from <https://www.thebritishacademy.ac.uk/news/cities-and-urban-infrastructure-global-south-be-stretched-beyond-breaking-point/>
- Dag Hammarskjöld Library. (n.d.). Introduction - UN Documentation: Development. Retrieved November 18, 2022, from <https://research.un.org/en/docs/dev>
- Drinking-water. (2022, March 21). Retrieved November 27, 2022, from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water>
- Esipova, N., Ray, J., & Han, Y. (2020, June 16). 750 million struggling to meet basic needs with no safety net. Retrieved November 18, 2022, from <https://news.gallup.com/poll/312401/750-million-struggling-meet-basic-needs-no-safety-net.aspx>
- Fadhil, H. (2019, February 11). Belajar Berantas Rasuah, Komite Antikorupsi Afghanistan Sambilan KPK. Retrieved November 19, 2022, from <https://news.detik.com/berita/d-4462462/belajar-berantas-rasuah-komite-antikorupsi-afghanistan-sambilan-kpk>
- Farizan, F. N., & Heryadi, D. (2021). Indonesia's involvement in the Afghanistan peacebuilding process. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 22(2), 244. doi:10.7454/global.v22i2.475
- Global Forest Resource Assessment 2020. (2020). Retrieved November 27, 2022, from <https://www.fao.org/forest-resources-assessment/2020/en/>
- Global Goal 5: Gender Equality (Ages 11: 17)* [Video file]. (2018). Retrieved November 18, 2022, from <https://video.alexanderstreet.com/watch/global-goal-5-gender-equality-ages-11-17>
- Global Goal 9: Industry, Innovation and Infrastructure (Ages 11: 17)* [Video file]. (2018). Retrieved November 18, 2022, from <https://video.alexanderstreet.com/watch/global-goal-9-industry-innovation-and-infrastructure-ages-11-17>
- Goal 10 | Reduce inequality within and among countries. (n.d.). Retrieved November 18, 2022, from <https://sdgs.un.org/goals/goal10>
- Goal 11 | Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable. (n.d.). Retrieved November 18, 2022, from <https://sdgs.un.org/goals/goal11>
- Goal 12 | Ensure sustainable consumption and production patterns. (n.d.). Retrieved December 8, 2022, from <https://sdgs.un.org/goals/goal12>
- Goal 15 | Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably

- manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss. (n.d.). Retrieved November 27, 2022, from <https://sdgs.un.org/goals/goal15>
- Goal 16 | Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels. (n.d.). Retrieved November 19, 2022, from <https://sdgs.un.org/goals/goal16>
- Goal 16: Peace, Justice and strong institutions. (2022, April 20). Retrieved November 19, 2022, from <https://www.globalgoals.org/goals/16-peace-justice-and-strong-institutions/>
- Goal 2 | End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture. (n.d.). Retrieved December 3, 2022, from <https://sdgs.un.org/goals/goal2>
- Goal 3 | Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. (n.d.). Retrieved December 3, 2022, from <https://sdgs.un.org/goals/goal3>
- Goal 6 | Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all. (n.d.). Retrieved November 27, 2022, from <https://sdgs.un.org/goals/goal6>
- Goal 7 | Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all. (n.d.). Retrieved November 18, 2022, from <https://sdgs.un.org/goals/goal7>
- Goal 8 | Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all. (n.d.). Retrieved November 18, 2022, from <https://sdgs.un.org/goals/goal8>
- International Labour Organization. (2016). World Employment Social Outlook. Retrieved November 18, 2022, from [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms\\_443480.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_443480.pdf)
- International NGO Forum on Indonesian Development. (n.d.). Apa ITU sdgs. Retrieved November 18, 2022, from <https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2021, September 24). Pembukaan Beasiswa Seni Dan Budaya Indonesia virtual Tahun 2021: Portal Kementerian Luar negeri Republik Indonesia. Retrieved November 18, 2022, from <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2964/berita/pembukaan-beasiswa-seni-dan-budaya-indonesia-virtual-tahun-2021>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2022, April 15). Kedutaan Besar republik Indonesia di Suva, Merangkap Kiribati, Nauru dan Tuvalu Republik fiji. Retrieved November 18, 2022, from <https://kemlu.go.id/suva/id/news/18549/beasiswa-seni-dan-budaya-indonesia-bsbi-kembali-dibuka>
- Kementerian Sekretariat Negara. (2010, May 18). Indonesia Jadi Contoh Keberhasilan Pemberdayaan perempuan. Retrieved December 7, 2022, from [https://www.setneg.go.id/baca/index/indonesia\\_jadi\\_contoh\\_keberhasilan\\_pemberdayaan\\_perempuan](https://www.setneg.go.id/baca/index/indonesia_jadi_contoh_keberhasilan_pemberdayaan_perempuan)
- Kementerian Sekretariat Negara. (2017, November 14). Training of trainer of Gender Responsive Planning and budgeting for Fiji Development Officials 2. Retrieved November 18, 2022, from [https://www.setneg.go.id/baca/index/training\\_of\\_trainer\\_of\\_gender\\_responsive\\_planning\\_and\\_budgeting\\_for\\_fiji\\_development\\_officials\\_2](https://www.setneg.go.id/baca/index/training_of_trainer_of_gender_responsive_planning_and_budgeting_for_fiji_development_officials_2)
- Langendorf, J., & Leftwich, A. (2012). *Triangular cooperation: A guideline for working in practice*. Baden-Baden: Nomos.
- Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan In. (2021, April 30). Pemberian Hibah kepada Fiji, Solomon Island dan Timor Leste untuk Perkokoh Solidaritas dan Kemitraan di Pasifik. Retrieved November 18, 2022, from <https://ldkpi.kemenkeu.go.id/post/pemberian-hibah-kepada-fiji-solomon-island-dan-timor-leste-untuk-perkokoh-solidaritas-dan-kemitraan-di-pasifik>
- Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI). (n.d.). Sejarah. Retrieved November 18, 2022, from <https://ldkpi.kemenkeu.go.id/page/sejarah-ldkpi>
- Mulakala, A., & Waglé, S. (2016). *The Rise of the South and a New Age of South-South Cooperation*.

In 2187450474 1503929499 A. Mulakala (Ed.), *Contemporary Asian Perspectives on South-South Cooperation* (pp. 7-35). Sejong, South Korea: Korea Development Institute.

Negara Afrika dan timur tengah selesaikan Pelatihan Perikanan di Ambon. (2017, October 11). Retrieved December 8, 2022, from <https://www.tabloiddiplomasi.org/negara-afrika-dan-timur-tengah-selesaikan-pelatihan-perikanan-di-ambon/>

Peace, justice and strong institutions. (n.d.). Retrieved November 18, 2022, from <https://www.un.org/sustainabledevelopment/peace-justice/>

Pelatihan Petani Afrika oleh Indonesia. (2017, July 07). Retrieved November 18, 2022, from <http://www.tabloiddiplomasi.org/pelatihan-petani-afrika-oleh-indonesia/>

Perdamaian, Keadilan, Dan Kelembagaan Yang Kuat. (2019, October 07). Retrieved November 19, 2022, from <https://www.seadstem.org/id/sdg/peace-justice-and-strong-institutions/>

Rachman, D. A. (2019, March 11). Datangi KPK, Lembaga Antikorupsi Afghanistan Bahas kerja Sama Pemberantasan Korupsi. Retrieved November 19, 2022, from <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/11/18493321/datangi-kpk-lembaga-antikorupsi-afghanistan-bahas-kerja-sama-pemberantasan>

Redaksi AsiaToday. (2019, December 06). Perkuat Kerja Sama, Indonesia Bantu Kepulauan Solomon Bangun Stadion. Retrieved November 18, 2022, from <https://asiatoday.id/read/perkuat-kerja-sama-indonesia-bantu-kepulauan-solomon-bangun-stadion>

Rokom. (2021, May 17). Indonesia kirim 200 oxygen concentrators KE India. Retrieved November 18, 2022, from <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20210512/4937761/indonesia-kirim-200-oxygen-concentrators-ke-india/>

Sanitation. (2022, March 21). Retrieved November 27, 2022, from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sanitation>

Sen, A. K. (2001). *Development as freedom*. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.

Setiawanto, B. (2014, March 08). Indonesia bantu gambia di bidang pertanian. Retrieved November 18, 2022, from <https://www.antaraneews.com/berita/422866/indonesia-bantu-gambia-di-bidang-pertanian>

Sustainable development goal 16: Peace, Justice and strong institutions in Indonesia. (n.d.). Retrieved November 19, 2022, from <https://indonesia.un.org/en/sdgs/16/key-activities>

Tujuan 17. (n.d.). Retrieved November 19, 2022, from <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-17/>

United Nations High Commissioner for Refugees. (2019, June 19). Worldwide displacement tops 70 million, un refugee chief urges Greater Solidarity in response. Retrieved November 19, 2022, from <https://www.unhcr.org/en-us/news/press/2019/6/5d03b22b4/worldwide-displacement-tops-70-million-un-refugee-chief-urges-greater-solidarity.html>

United Nations. (n.d.). Peace, justice and strong institutions. Retrieved November 19, 2022, from <https://www.un.org/sustainabledevelopment/peace-justice/>

\_\_\_\_\_. (2022). *Global Humanitarian Overview 2023*.

Who coronavirus (COVID-19) dashboard. (n.d.). Retrieved December 3, 2022, from <https://covid19.who.int/>

The World Bank. (2022, September 14). Poverty. Retrieved November 18, 2022, from <https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview>

World hunger: Key facts and statistics on hunger 2022. (2022, May 27). Retrieved December 3, 2022, from <https://actionagainsthunger.ca/world-hunger-day/>